

***PAWESTREN DAN AKOMODASI***  
**MUSLIMAH JAWA DI RUANG PUBLIK**

(Studi pada Masjid Pathoknegaran di Yogyakarta)

**TESIS**

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister



Oleh:

**Perdana Putra Pangestu**

NIM: 2201028008

**PROGRAM MAGISTER KOMUNIKASI PENYIARAN**

**ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2024**



# NOTA PEMBIMBING

NOTA DINAS

Semarang, 21 Juni 2024

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Perdana Putra Pangestu**  
NIM : 2201028008  
Konsentrasi : -  
Program Studi : S2 Komunikasi Penyiaran Islam  
Judul : **PAWESTREN DAN AKOMODASI MUSLIMAH JAWA DI RUANG PUBLIK**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing,



**Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A.**  
NIP: 196310171991032001

NOTA DINAS

Semarang, 21 Juni 2024

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Perdana Putra Pangestu**  
NIM : 2201028008  
Konsentrasi : -  
Program Studi : S2 Komunikasi Penyiaran Islam  
Judul : **PAWESTREN DAN AKOMODASI MUSLIMAH JAWA DI RUANG PUBLIK**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. Anasom, M.Hum.**

NIP: 196612251994031004

# LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
PROGRAM STUDI S2 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7606405 Semarang 50185

---

---

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap : **Perdana Putra Pangestu**  
NIM : 2201028008  
Judul Penelitian : ***Pawestren dan Akomodasi Muslimah Jawa di Ruang Publik***  
(Studi pada Masjid Pathoknegaran di Yogyakarta)  
Program Studi : S2 Komunikasi Penyiaran Islam  
Konsentrasi : Komunikasi Penyiaran Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul,

***PAWESTREN DAN AKOMODASI MUSLIMAH JAWA DI RUANG PUBLIK***  
(Studi pada Masjid Pathoknegaran di Yogyakarta)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 4 Juli 2024  
Pembuat Pernyataan,

**Perdana Putra Pangestu**  
NIM: 2201028008

## ABSTRAK

Judul : *PAWESTREN DAN AKOMODASI MUSLIMAH  
JAWA DI RUANG PUBLIK  
(Studi pada Masjid Pathoknegaran di Yogyakarta)*

Penulis : Perdana Putra Pangestu

NIM : 2201028008

Portal ruang publik bagi muslimah Jawa untuk beribadah awalnya sangat elusif. Kultur dan struktur sosial yang mengakar kuat, terutama dalam komunitas Muslim Jawa, menyebabkan posisi perempuan termarginalkan. Keterpinggiran perempuan merupakan salah satu realitas sosial dalam konteks Jawa Islam sejak abad ke-18. Dominasi laki-laki dalam berbagai lini yang selanjutnya memunculkan demarkasi ruang publik bagi kalangan mereka; berbeda dengan perempuan yang lekat dengan ruang privat. Terlebih pada operasionalisasi masjid yang awalnya cenderung hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Sedangkan masjid ditafsirkan agar “terhindar” dari perempuan, akibat benturan diktum dalam teks Islam, serta kultur Jawa saat itu.

*Pawestren* muncul sebagai sendi eksistensial bagi akses peribadatan di ruang publik bagi muslimah Jawa. *Pawestren* sendiri merupakan salah satu bagian yang dapat dijumpai di masjid-masjid tradisional Jawa, yang mana difungsikan untuk ruang ibadah perempuan. Eksistensi *pawestren*, dinilai menjadi implikasi penting dalam roda sosial, utamanya terkait relasi antara laki-laki dan perempuan.

Melalui paparan tersebut, muncul postulat bahwa *pawestren* lahir sebagai bentuk inisiasi kolektif berupa negasi perempuan atas superioritas laki-laki. Peneliti mengajukan pertanyaan tentang (a) mengapa eksistensi *pawestren* signifikan dalam mewadahi peribadatan Muslimah Jawa?, dan (b) bagaimana dialog Muslimah Jawa dalam memperoleh akses peribadatan publik yang setara?

Penelitian ini disusun melalui metode analisis-deskriptif dengan kerangka fenomenologi. Peneliti menelusuri aspek yang mengorbit tentang *pawestren* di Masjid Pathoknegeran, Yogyakarta. Peneliti mengaplikasikan pendekatan komunikasi ruang publik, gender dan sosial-budaya. Ketiga perspektif ini dinilai mampu mengeksplorasi temuan di lapangan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *pawestren* tidak hanya menjadi produk arsitektural, melainkan indikator Bergeraknya dinamika bagi muslimah, baik spiritual maupun sosial. Perempuan juga aktif sebagai aktor dalam spektrum sosial, dengan menggalang opini atas ketimpangan yang mereka alami di bawah hegemoni kuasa laki-laki, hal ini termanifestasi salah satunya melalui *pawestren*.

**Kata Kunci:** *Pawestren*, Akomodasi Muslimah Jawa, Ruang Publik

## ABSTRACT

Title : *PAWESTREN DAN AKOMODASI MUSLIMAH  
JAWA DI RUANG PUBLIK*  
(*Studi pada Masjid Pathoknegaran di Yogyakarta*)

Author : Perdana Putra Pangestu

NIM : 2201028008

The public space for Javanese Muslim women to worship was initially elusive. Deeply rooted culture and social structures, especially within the Javanese Muslim community, marginalized women. The marginalization of women has been a social reality in the context of Javanese Islam since the 18th century. Male dominance across various spheres led to the demarcation of public spaces for them, unlike women who were associated with the private sphere. Particularly, in the operationalization of mosques, which were initially predominantly for men. Mosques were interpreted to be "protected" from women due to clashes between Islamic texts and Javanese culture at that time.

*Pawestren* emerged as a cornerstone for women's access to public worship spaces for Javanese Muslim women. *Pawestren* is found in traditional Javanese mosques, serving as spaces for women's worship. The existence of *pawestren* is considered an important implication in social dynamics, especially regarding the relationship between men and women.

Through this exposition, a postulate emerges that *pawestren* was born as a collective initiation in the form of women's negation of male superiority. The researcher poses questions about (a) why is the existence of *pawestren* significant in accommodating Javanese Muslim women's worship?, and (b) how Javanese Muslim women engage in dialogue to obtain equal access to public worship.

This study was conducted using a descriptive analysis method with a phenomenological framework. The researcher explored aspects orbiting around *pawestren* at the Pathoknegaran Mosque in Yogyakarta.

The researcher applied approaches from public space communication, gender, and socio-cultural perspectives. These three perspectives were deemed capable of exploring findings in the field.

The study concludes that *pawestren* is not just an architectural product but also an indicator of the dynamics for Muslim women, both spiritually and socially. Women are also active actors in the social spectrum, voicing opinions on the inequalities they experience under male hegemony, manifested in part through *pawestren*.

**Keyword:** *Pawestren*, Accommodation of Javanese Muslim Women, Public Sphere

## TRANSLITERASI

1. Konsonan		
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Ṣa	ṣ
ج	Jim	J
ح	Ḥa	ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	d
ذ	Ḍal	ḏ
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Ṣad	ṣ
ض	Ḍad	ḏ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Ẓa	ẓ
ع	`ain	`
غ	Gain	g
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l

م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Wau	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y

2. Vokal Pendek			
..َ.	= a	كَتَبَ	kataba
..ِ.	= i	سُئِلَ	su’ila
..ُ.	= u	يَذْهَبُ	yažhabu

3. Vokal Panjang			
أ...	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

## KATA PENGANTAR

Berpijak atas rasa syukur kepada Allah SWT., serta selawat kepada Nabi SAW., dengan rendah hati Peneliti menghibahkan hasil pikiran berupa tesis berjudul, *Pawestren dan Akomodasi Muslimah Jawa di Ruang Publik (Studi pada Masjid Pathoknegaran di Yogyakarta)*.

Tesis ini merupakan hasil dari buah refleksi atas tamasya sosial-spiritual yang Peneliti sempat saksikan selama menghabiskan empat tahun masa studi di Yogyakarta. Singkatnya, pengalaman ini bertransformasi menjadi keresahan akademik yang Peneliti rasa harus dituahkan dalam sebuah noktah karya. *Alhamdulillah*, kans untuk terus belajar dan berkembang secara institusional diwadahi oleh LPDP & Kementerian Agama RI melalui S2 KPI UIN Semarang yang Peneliti jalani mulai dari kuartal akhir di tahun 2022.

Tesis ini memuat penyaksian Peneliti terhadap distingsi khazanah Islam di Jawa. Peneliti sangat tertarik, khususnya pada diskursus perjumpaan dialektika, antara Islam dan kultur Jawa yang sangat kuat. Hal ini kemudian menghasilkan produk-produk budaya, sebagaimana yang Peneliti saksikan melalui *pawestren* di Masjid Pathoknegaran Yogyakarta. Peneliti mengamati dinamika sosial (dalam kerangka gender-feminisme) yang unik, yang mana beberapa sektor bahkan tidak bisa dikawinkan dengan perspektif *mainstream* ala barat. Oleh karena itu, Peneliti tergugah untuk mengangkat khazanah yang khas dalam konstruksi orbit Islam, gender dan Jawa.

Dalam hal ini, Peneliti wajib berterima kasih kepada semua pihak yang telah **mewadahi, menuntun, menunjang, dan mendorong** realisasi tesis ini. Mulai dari institusi, jajaran dosen dan staf, para informan penelitian, hingga keluarga, orang terdekat, serta semua kolega.

Peneliti harap karya ini dapat menjadi sumbangsih bagi pembaca dan khazanah Islam yang terus berhembus dengan berbagai dinamikanya. Lebih khusus pada diskursus gender-Jawa, harapannya agar dapat tersisip menjadi salah satu senarai bacaan peneliti-peneliti selanjutnya dengan minat yang sama. Peneliti pun menyadari bahwa tesis ini masih perlu pengembangan dan diperlukan analisis-kritik yang komprehensif ke depannya. Semoga bermanfaat bagi siapapun, *Aaamiin*.

**Perdana Putra Pangestu**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	viii
TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Teoritik.....	10
2. Praktik.....	11
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Komunikasi Ruang Publik .....	17
2. Teori Standpoint.....	21
3. Isu Kesetaraan Gender .....	24
G. Metode Penelitian .....	28
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
2. Subjek Penelitian .....	30
3. Objek Penelitian.....	32

4.	Teknik Pengumpulan Data .....	33
5.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	37
6.	Teknik Analisis Data .....	38
7.	Sistematika Pembahasan .....	39
<b>BAB II DESKRIPSI PAWESTREN DI MASJID-MASJID PATHOK NEGARA YOGYAKARTA .....</b>		<b>42</b>
A.	Sekilas tentang <i>Pawestren</i> .....	42
B.	Sejarah Konsep Masjid-masjid Pathoknegeran di Yogyakarta .....	49
1.	Masjid Mlangi .....	56
2.	Masjid Plosokuning .....	58
3.	Masjid Babadan .....	61
4.	Masjid Dongkelan .....	63
<b>BAB III DINAMIKA &amp; KOMUNIKASI RUANG PUBLIK MUSLIMAH JAWA DALAM PAWESTREN .....</b>		<b>66</b>
A.	Diskursus Gender di Ruang Publik dan Privat .....	66
B.	Dinamika <i>Pawestren</i> sebagai Ruang Publik bagi Perempuan .....	69
<b>BAB IV ANALISIS TEMUAN DALAM PERSPEKTIF TEORI KOMUNIKASI RUANG PUBLIK &amp; TEORI STANDPOINT.....</b>		<b>81</b>
A.	Teori Ruang Publik dalam Perspektif Habermas .....	81
B.	Teori <i>Standpoint</i> dalam Perspektif Sandra Harding .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>94</b>
A.	Kesimpulan .....	94
B.	Implikasi dan Saran Penelitian .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....		98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		108

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akses Muslimah Jawa awal untuk melakukan peribadatan di ruang publik menjadi hal yang cukup elusif. Kultur, norma serta konstruksi sosial yang membumi, khususnya di masyarakat Muslim Jawa, membuat posisi perempuan tampak termarginalisasi. Pelbagai benturan diktum, sebagaimana dalam Islam dan kultur sosial Jawa, membuat eksistensi para perempuan berada di ambang kegamangan. Tabir situasi sosial yang riil ini mendorong untuk dibongkar dalam rangka memahami bagaimana interaksi, kuasa, kepercayaan, ideologi yang dominan dan terselubung di masyarakat.<sup>1</sup>

Potret subordinatif perempuan menjadi salah satu fakta sosial yang konkret berlatar autokrasi Jawa Islam di abad ke-18 dan berlanjut hingga periode post-kolonial. Faksi laki-laki menjadi figur sentral dalam banyak lini, dengan stereotip kokoh, rasional, jantan dan tangguh; lain halnya dengan perempuan yang teridentifikasi sebagai kelompok yang lemah lembut, pandai bersolek, emosional dan lekat dengan urusan seksualitas semata.<sup>2</sup> Kenyataan sosial ini langgeng menjadi sebuah tradisi dan tatanan

---

<sup>1</sup> Roro Retno Wulan, "Kajian Gender Dalam Ilmu Komunikasi," *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna* 15, no. 1 (2019): 33.

<sup>2</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8.

yang lazim terpatri kepada seluruh perempuan, serta menyiratkan bagaimana hegemoni relasi yang dibentuk antara laki-laki dan perempuan tersebut.<sup>3</sup> Fakta ini sangat menarik apabila kemudian ditarik pada eksistensi *Pawestren* sebagai wadah bagi para perempuan dalam mengekspresikan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Muslim Jawa kala itu.

*Pawestren* merupakan aspek penting dalam masjid-masjid tradisional Jawa, yang diperuntukkan khusus bagi jamaah perempuan. Ruang ini memiliki peran yang signifikan dalam menjaga privasi perempuan saat menjalankan ibadah dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. *Pawestren* memberikan jamaah perempuan ruang untuk membuka hijab, menjalankan aktivitas ibadah, dan berinteraksi dengan sesama jamaah perempuan tanpa risiko terlihatnya aurat mereka oleh laki-laki. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mendorong pemisahan gender dalam ruang ibadah. *Pawestren* merupakan konsep yang telah berkembang dalam masjid-masjid tradisional Jawa dan memiliki implikasi penting

---

<sup>3</sup> Lihat bagaimana bukti eksplisit atas konstruk ideal perempereempuan Jawa yang dicanangkan oleh pihak kerajaan yang banyak bermuatan represif dan mendiskreditkan kaum perempuan, baik relasinya dalam keluarga maupun di ruang publik. Misalnya dalam Sri Harti Widyastuti, “Kepribadian Wanita Jawa Dalam Serat Suluk Residriya Dan Serat Wulang Putri Karya Paku Buwono IX,” *Litera* 13, no. 1 (2014): 114–27; Darusuprpta, dkk, *Etika Jawa Sebuah Analisis Filsafat Tentang Kebijakan dan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1988), 110.

dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam ruang peribadatan publik.

*Pawestren*, sebagai bagian integral dari arsitektur masjid-masjid tradisional Jawa, umumnya terletak di sisi sayap kanan atau kiri sebuah masjid. *Pawestren* memiliki proporsi ruang yang cenderung lebih minim jika dibandingkan dengan *Liwan*, yaitu ruang utama masjid yang diperuntukkan bagi jamaah laki-laki. Keberadaan *Pawestren* yang lebih kecil bukanlah sekadar refleksi ukuran fisik, tetapi mencerminkan realitas sosial dan budaya yang mendasari peran perempuan dalam ruang ibadah.

Berangkat dari tesis Pijper, konsep *Pawestren* dalam masjid-masjid tradisional Jawa berperan sebagai indikator kesetaraan akses dalam peribadatan dan interaksi ruang publik.<sup>4</sup> *Pawestren*, yang merujuk pada ruang khusus bagi Muslimah dalam masjid, menjadi simbol penting dalam upaya mengangkat kesetaraan akses di dalam konteks agama dan ruang publik. Konsep *Pawestren* mencerminkan evolusi dalam pemikiran dan praktik sosial di masyarakat Muslim Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan peran perempuan dalam konteks agama dan ruang publik semakin diberikan tempat yang lebih signifikan. Konsep ini tidak hanya memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam ibadah secara lebih aktif, tetapi juga

---

<sup>4</sup> Guillaume Frédéric Pijper, *Fragmento Islamica, Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam Di Indonesia Awal Abad XX*, Terj. Tadjimah (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1987), 4–5.

memberikan mereka ruang untuk berinteraksi dalam konteks ruang publik masjid.

Terdapat variasi fakta yang kaya mengenai keberadaan masjid khusus untuk perempuan. Salah satu kontribusi signifikan dalam literatur berasal dari Pijper, yang menyoroti berbagai temuan terkait masjid khusus perempuan. Sebagai contoh, kelompok 'Aisyiah di Kauman-Yogyakarta menginisiasi pendirian Masjid Wanita pada tahun 1922/23 M. Keberadaan ini kemudian diikuti oleh pendirian Masjid Wanita di Karangkajen pada tahun 1927 dan di Suronatan.<sup>5</sup> Penekanan pada pendirian masjid khusus perempuan mencerminkan upaya kelompok 'Aisyiah dalam membangun ruang ibadah yang inklusif dan memberikan wadah bagi perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Sebagaimana yang juga dicatat oleh Aisyah & Asyiril bahwa dinamika kelompok muslimah juga terjadi di Masjid Wanita di Sungai Limau-Padang pariaman, terinisiasi oleh kelompok 'Aisyiah untuk berkumpul serta berinteraksi secara publik.<sup>6</sup>

Kemudian, *Pawestren* di masjid-masjid tradisional Jawa juga tersebar luas dan dapat diidentifikasi di sejumlah tempat. Contohnya, *Pawestren* dapat ditemukan di Masjid Agung Surakarta, Masjid Agung Cirebon, Masjid Sunan Giri, Masjid

---

<sup>5</sup> Pijper, 3–4.

<sup>6</sup> Siti Aisyah and Asril Asril, “Mesjid Wanita Di Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman (Kajian Sejarah Sosial),” *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 2 (2015): 217–18.

Agung Lamongan, Masjid Agung Demak, Masjid Imogiri, Masjid Agung Mataram Kotagede, hingga Masjid-masjid Pathoknegaran di Yogyakarta. *Pawestren* tidak hanya sekedar menjadi elemen arsitektur pada satu atau dua lokasi, melainkan mendemonstrasikan kehadirannya di berbagai masjid dengan warisan kultural serta kekayaan dialektika. Eksistensi *Pawestren* tersebut mencerminkan inklusivitas di ruang publik untuk kelompok perempuan.

Gap ini jelas terjadi ketika pelbagai kenyataan sosial mengalami gesekan dengan konsep *Pawestren*. Sebagai mana yang disampaikan Stivens yang mengungkap bahwa tradisi ideologi, khususnya Asia Tenggara, memiliki tendensi “publik” dan “privat”, yang masing-masing diperuntukkan ke laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup> Pernyataan tersebut merefleksikan atmosfer kultur Jawa yang sarat dengan kecenderungan demarkasi ranah publik didominasi oleh laki-laki, sementara ranah privat lebih sering dianggap sebagai wilayah perempuan. Realitas ini memiliki sejumlah alasan yang substansial.

Sebagian besar kultur awal memiliki warisan yang mengakar kuat dalam pemisahan peran laki-laki dan perempuan. Hal ini direpresentasikan dalam lintas historis, mitos, dan norma-norma sosial yang menguatkan distorsi ini. Selanjutnya, struktur

---

<sup>7</sup> Maila Stivens, “Why Gender Matters in Southeast Asian Politics,” *Asian Studies Association of Australia. Review* 13, no. 1 (July 1989): 5–8.

keluarga tradisional membagi peran dalam cara yang lebih kaku, dengan laki-laki dominan berperan sebagai aktor di luar rumah, sedangkan perempuan sering dinavigasikan pada urusan-urusan rumah tangga dan keluarga. Kemudian norma sosial juga memainkan peran penting. Norma sosial yang lestari di masyarakat Jawa awal sering kali mendorong peran gender yang terpisah, dengan laki-laki didorong untuk mengejar karier dan memiliki pengaruh di ranah publik, sementara perempuan didorong untuk memprioritaskan perannya di dalam rumah. Terakhir, dogma agama yang dominan juga memainkan peran dalam mempertahankan distorsi ini, dengan interpretasi dan tradisi agama yang ditafsirkan sebagai alat pembagian peran bagi laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>

Kembali ke *Pawestren*, simbol ruang ini tidak hanya menjadi produk arsitektural di sebuah masjid, namun juga menyalurkan pesan kritik yang memiliki muatan ekspresif para Muslimah Jawa. **Pertama**, Bagaimana *Pawestren* menjawab dalil agama yang mengedepankan bahwa perempuan idealnya beribadah di rumah dan ruang tertutup?<sup>9</sup> **Kedua**, bagaimana

---

<sup>8</sup> Stivens, 9–10.

<sup>9</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 2009), chap. 6, 301.

*Pawestren* menjawab tuduhan diskriminasi perempuan di ruang publik karena terpisah dari ruang utama sebuah masjid?<sup>10</sup>

Dua pertanyaan tersebut merupakan titik atensi peneliti dalam mengulik lebih intens mengenai ritme interaksi yang terjadi di era awal eksistensi *Pawestren* di masjid-masjid tradisional Jawa. Menelusuri sikap Muslimah Jawa awal dalam membentuk dialog serta komunikasi komunal yang digagas untuk memperoleh akses kesetaraan ibadah menjadi topik interest peneliti. Pembongkaran simbol ini menjadi signifikan untuk menginterpretasikan esensi di dalamnya, khususnya menelusuri jejak dialog Muslimah Jawa dalam hal peribadatan di ruang publik.

Peneliti berasumsi bahwa terdapat “negasi” yang diusung kelompok perempuan, yang pada akhirnya menghasilkan produk berupa konsep *Pawestren* pada masjid-masjid tradisional Jawa. Dominasi kepentingan kaum laki-laki yang bersifat supresif, tersusun atas konstruk sosial-budaya dan aksioma doktriner, terhadap kelompok perempuan menjadikan akses peribadatan dan asosiasi di ruang publik menjadi alot.<sup>11</sup>

Pemahaman mengenai perbedaan gender dalam penggunaan masjid sebagai ruang publik bagi Muslim dan Muslimah dapat ditengarai melalui penelusuran Pijper. Penelitian

---

<sup>10</sup> Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin ’Amr al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Risalah al-Ilmiyyah, 2009), chap. 1, no. 482.

<sup>11</sup> Wulan, “Kajian Gender Dalam Ilmu Komunikasi,” 34.

Pijper mengungkapkan adanya friksi dan kontestasi yang terkait dengan okupasi masjid sebagai tempat ibadah yang merupakan ruang publik. Terlihat bahwa ada ketegangan yang muncul antara kelompok perempuan untuk melaksanakan ibadah, namun dianggap sebagai sesuatu yang "tabu" oleh kelompok pria di beberapa wilayah pada awal kuartal kedua abad ke-20. Hal ini mencerminkan kompleksitas dinamika sosial (juga gender) dalam penggunaan ruang publik keagamaan, di mana tradisi dan norma sosial dapat mempengaruhi cara individu merespons partisipasi Muslimah Jawa dalam aktivitas keagamaan di lingkungan yang tradisionalnya didominasi oleh laki-laki. Temuan-temuan ini memberikan Peneliti sebuah pandangan berharga mengenai bagaimana dialog ruang publik yang telah memengaruhi pengalaman perempuan dalam beragama dan berpartisipasi dalam ruang publik.<sup>12</sup> Hal ini selanjutnya mendorong eksistensi hak Muslimah Jawa yang tidak diwadahi dengan setimpal dalam rutinitas kesehariannya, melahirkan desakan untuk merotasi putusan mengenai portal ibadah yang sejajar.

Terlibat di dalam ekosistem formal yang dikuasi dengan superioritas kaum pria, tidak membuat kelompok Muslimah

---

<sup>12</sup> Pijper, *Fragmento Islamica, Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam Di Indonesia Awal Abad XX*, Terj. Tadjimah, 43; Mufidah Cholil, "Complexities in Dealing with Gender Inequality: Muslim Women and Mosque-Based Social Services in East Java Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (n.d.): 459.

Jawa disekap untuk menunjukkan eksistensi mereka sepenuhnya. Kaum perempuan Muslimah Jawa terbukti mampu menawarkan terobosan sosial, utamanya di ruang publik, yang termanifestasi melalui *Pawestren*.<sup>13</sup> Riset ini diharapkan bisa bermuara pada inisiatif untuk mewujudkan komunikasi sosial yang bernafaskan prinsip egaliter di ruang publik secara kontinu, dengan tidak mengabaikan doktrin Islam dan tradisi ke-nusantara-an.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melalui peninjauan terhadap pemaparan di atas, Peneliti merumuskan suatu fokus permasalahan yang mendasari konteks tersebut, yaitu:

1. Mengapa eksistensi *pawestren* signifikan dalam mewedahi peribadatan Muslimah Jawa?
2. Bagaimana dialog Muslimah Jawa dalam memperoleh akses peribadatan publik yang setara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat menjangkau raihan akademis dengan hasil yang objektif, terperinci dan memiliki signifikansi dengan orbit kajian komunikasi-dakwah dan sosial-budaya. Beberapa tujuan di antaranya yakni:

1. Memahami signifikansi posisi *Pawestren* dalam mewedahi peribadatan Muslimah Jawa.

---

<sup>13</sup> Yayuk Fauziyah, "Menyingkap Kuasa Maskulinitas Di Balik Tabir Feminitas Wanita Jawa," *Ulumuna* 12, no. 1 (2008): 196.

2. Memahami dialog Muslimah Jawa dalam memperoleh akses peribadatan publik yang setara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada segi fungsional, Peneliti berharap agar kajian ini dapat memberikan nilai guna baik bagi perspektif teoretis maupun praktis.

Berikut di antara manfaat penelitian yang diharapkan:

##### **1. Teoritik**

Penelitian ini memiliki potensi besar untuk menyuguhkan khazanah baru, khususnya bagi disiplin keilmuan komunikasi-dakwah yang sarat dengan nuansa sosial budaya berlatar kultur Jawa. Dalam menggali khazanah baru ini, penelitian berusaha menjembatani pemahaman antara komunikasi ruang publik oleh Muslimah Jawa dengan kekayaan nilai-nilai kultural setempat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu membuka pintu menuju pemahaman yang lebih fundamental tentang dinamika komunikasi dalam ranah kultural Jawa, memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan lebih lanjut yang spesifik dalam bidang ini, dan mengenalkan dimensi-dimensi baru yang berpotensi memperkaya kerangka pengetahuan komunikasi-dakwah secara umum.

## **2. Praktik**

Penelitian ini memiliki tujuan yang lebih jauh daripada sekadar eksplorasi teoretis, dengan harapan mampu menghadirkan paradigma baru yang berpotensi menjadi pendorong utama modifikasi habit. Paradigma baru ini diarahkan untuk mendorong masyarakat dalam menggali lebih dalam dan memahami dengan lebih baik warisan budayanya. Melalui pemahaman yang lebih fundamental tentang budaya, penelitian ini berupaya merangsang kesadaran masyarakat mengenai pentingnya merawat produk budaya yang sarat histori. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong perubahan dalam ruang publik, di mana kesetaraan menjadi prioritas utama. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat merealisasikan kesetaraan sosial di ranah publik yang berlandaskan nilai islami dan ke-nusantara-an. Dengan demikian, penelitian ini dapat kontribusi signifikan dalam perubahan sosial dan pemahaman masyarakat terhadap peran budaya dalam mendorong kesetaraan di masyarakat yang lebih luas, khususnya kultur masyarakat Jawa.

## **E. Kajian Pustaka**

Bertumpu pada beberapa pendekatan yang memuat haluan pokok dalam penelitian ini, Peneliti memakai landasan

kepastakaan dengan tidak mengabaikan perspektif komunikasi ruang publik, gender dan sosial-budaya. Untuk itu, Peneliti menelusuri tebaran pustaka yang terdiri atas tiga pendekatan pokok di atas untuk memperoleh pijakan kuat dalam menyinambungkan penelitian agar lebih utuh.

*Pertama*, literatur yang relevan dengan aspek komunikasi ranah publik telah peneliti temukan dalam sejumlah sumber yang dapat memberikan wawasan mendasar. Sebagai contoh, investigasi milik Aryatin yang menguraikan dinamika yang dijalankan ‘Aisyiyah dalam memenangkan kontestasi akses pendidikan dan partisipasi sosial kaum perempuan di tengah arus budaya patriarki yang menonjol.<sup>14</sup> Pengaplikasian gagasan komunikasi dalam ulasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang organisasi, seperti 'Aisyiyah, dalam mengatasi tantangan sosial dan budaya yang terjadi. Aryatin menunjukkan adanya identitas perempuan yang “baru” yang bernafaskan nilai liberasi, ke-Islaman dan ke-nusantara-an. Literatur ini dapat menjadi sumber yang berharga untuk memperkaya penelitian ini.

Dalam tulisannya yang lain, Aryatin juga mencoba menelisik bagaimana “batasan” gender yang berlaku di masjid sebagai ruang publik umat Islam. Ia memaparkan bahwa seharusnya ada re-

---

<sup>14</sup> Tutin Aryanti, “Shame and Borders: The ‘Aisyiyah’s Struggle for Muslim Women’s Education in Indonesia,” in *Gender, Religion and Education in a Chaotic Postmodern World*, ed. Zehavit Gross, Lynn Davies, and Al-Khansaa Diab (Dordrecht: Springer Netherlands, 2013), 83–92.

definisi terhadap konsep ruang publik dan ruang privat dalam Islam, khususnya dalam menjernihkan pola partikular yang terjadi di sosio-kultur Jawa.<sup>15</sup> Tentunya tulisan ini memberikan perspektif yang krusial bagi Peneliti dalam melacak pergulatan dinamika kelompok perempuan di bawah cagar dominasi laki-laki yang cenderung supresif.

**Kedua**, sendi kepustakaan yang berkaitan dengan aspek gender, Peneliti peroleh dalam beberapa literatur. Misalnya Dzuhayatin memaparkan konstruk rezim gender yang berkelindan di sekitar muslim perkotaan, khususnya dalam keorganisasian Muhammadiyah di Yogyakarta.<sup>16</sup> Dzuhayatin menjelaskan bagaimana eksistensi perempuan dalam ekosistem awal abad ke-20 yang bergumul di tengah konstruksi sosial yang dominan dengan praktik patriarkis. Apakah posisi perempuan sebagai *Property owner*, *Head compliment*, *Senior-junior complement* atau *Equal partnership* memberikan sumbangan pijakan dalam melihat posisi Muslimah Jawa di ruang privat maupun publik.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tutin Aryanti, "Women's Prayer Space: Body and Boundary," *The International Journal of the Constructed Environment* 2, no. 3 (2012): 177–90.

<sup>16</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas Dan Eksistensi* (Suka Press Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>17</sup> Letha Scanzoni and John Scanzoni, "Men, Women and Change: A Sociology of Marriage and Family.," 1976

Aryanti juga menawarkan perspektif ke Peneliti melalui sebuah disertasinya. Ia memaparkan bagaimana segregasi gender, utamanya yang dimotori dengan bahu agama, menimbulkan diskriminasi dan berdampak bagi eksistensi kaum marginal (para perempuan). Disertasi ini mempertanyakan internalisasi dari pemaknaan segregasi gender, kemudian menelusuri siapa yang punya wewenang dalam menyemai konsep tersebut, khususnya di umat Islam Yogyakarta.<sup>18</sup>

Selanjutnya terdapat uraian dari Mufidah yang mendalami bagaimana relasi kuasa dalam masyarakat muslim dengan dominasi kaum laki-laki, sedangkan perempuan menjadi subjek yang termarginalkan. Mufidah juga memaparkan bagaimana peranan para perempuan di masjid sebagai ruang publik dengan latar masyarakat Jawa Timur.<sup>19</sup>

**Ketiga**, literatur kepustakaan yang mengurai aspek sosial-budaya historis berkenaan dengan penelitian ini masif ditemui. Untuk mendapatkan pustaka acuan mengenai potret masjid-masjid tradisional Jawa, Peneliti berpijak misalnya pada *Sejarah Masjid-masjid Kuno di Indonesia* (1999) milik Effendi Djohan yang membeberkan jejak arkeologi masjid, fungsi serta peran

---

<sup>18</sup> Tutin Aryanti, “Breaking the Wall, Preserving the Barrier: Gender, Space, and Power in Contemporary Mosque Architecture in Yogyakarta, Indonesia” (PhD Thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2013)

<sup>19</sup> Cholil, “Complexities in Dealing with Gender Inequality.”

masjid di Indonesia.<sup>20</sup> Wirjosuparto dalam *Sedjarah Bangunan Mesdjid di Indonesia* juga mengurai stratifikasi masjid nusantara yang memiliki corak khasnya masing-masing.<sup>21</sup>

Kemudian yang tak luput dari pandangan Peneliti adalah penelusuran GF. Pijper yang mengurai lebih utuh dan lebih dalam mengenai korelasi “Wanita dan Mesjid” yang terkodifikasi dalam *Fragmento Islamica*. Di sini Pijper menjelaskan pengalaman observasinya terhadap dinamika kelompok perempuan dengan masjid sebagai ruang peribadatan publik umat Islam, yang mana observasinya berlatar di Jawa.<sup>22</sup>

Berdasarkan telaah kepustakaan yang dilakukan, Peneliti mengidentifikasi kekosongan informasi yang perlu diisi dalam menjawab problem penelitian terkait *Pawestren*. Dalam literatur yang telah diakses, tampak bahwa minimnya literatur yang secara spesifik membahas tentang *Pawestren*, khususnya dalam konteks masjid-masjid tradisional di Jawa. Keterbatasan ini menciptakan suatu celah akademik yang memerlukan penggalian lebih lanjut untuk memahami kausalitas, peran, evolusi, dan dampak *Pawestren* dalam dinamika ruang publik Muslimah Jawa.

---

<sup>20</sup> Effendi Djohan, *Sejarah Masjid-Masjid Kuno Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama, 1999).

<sup>21</sup> Sutjipto Wirjosuparto, “Sedjarah Bangunan Mesdjid Di Indonesia,” *Almanak Muhammadiyah* 1381, no. 1382 (1962): 64–76.

<sup>22</sup> Pijper, *Fragmento Islamica, Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam Di Indonesia Awal Abad XX, Terj. Tudjimah*.

Dengan merinci dan merumuskan kerangka teoretis serta merujuk pada literatur yang relevan, Peneliti dapat mengarahkan penelitian ke jalur yang lebih terfokus dan mendalam. Paparan literatur yang ditemukan oleh Peneliti bukan hanya menjadi landasan teoretis, tetapi juga menjadi titik awal untuk merancang metodologi yang sesuai dan merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan. Selain itu, kekosongan literatur dapat membuka peluang penelitian baru yang menghasilkan kontribusi signifikan dalam pemahaman ruang publik Islam berlatar kultur Jawa, khususnya terkait *Pawestren*, dan menyediakan landasan bagi penelitian masa depan di bidang ini.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori menjadi landasan konseptual yang krusial dalam mengatasi permasalahan penelitian yang dihadapi. Peneliti mengadopsi dua pisau analisis utama yang mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan rumusan masalah yang diajukan. **Pertama**, Teori Komunikasi Ruang Publik (*public sphere*) yang dikembangkan oleh Habermas. Teori ini menawarkan pemahaman tentang bagaimana ruang publik berfungsi sebagai tempat di mana individu-individu dapat berpartisipasi dalam diskusi terbuka, komunikasi yang rasional, dan pembentukan opini publik yang kritis. **Kedua**, Teori *Standpoint* yang diusung oleh Sandra Harding menjadi alat analisis yang signifikan. Teori ini mengarahkan artensi kepada perspektif khas yang dimiliki oleh kelompok-kelompok subordinat dalam masyarakat, terutama dalam

konteks gender. Dengan menggabungkan dua kerangka teori ini, penelitian ini memiliki dasar yang kuat untuk menggali kedalaman masalah yang diteliti, dan mengembangkan pemahaman yang lebih utuh.

### **1. Teori Komunikasi Ruang Publik**

Ruang publik (*public sphere*), yang diakui sebagai salah satu elemen kunci dalam konsep studi komunikasi dan teori sosial, diangkat Jürgen Habermas tahun 1989.<sup>23</sup> Di dalamnya, Habermas mengupas habis konsep ruang publik sebagai sebuah domain sosial yang melibatkan berbagai saluran penyedia informasi dan perdebatan politis yang mendasar. Ruang publik ini, menurut Habermas, adalah tempat di mana kebebasan berbicara, hak untuk berserikat, dan partisipasi dalam kancah publik sangat dihormati.

Pentingnya ruang publik tidak hanya terbatas pada makna fisiknya sebagai "bangunan untuk publik," melainkan lebih pada makna abstraknya sebagai sebuah situasi di mana masyarakat dari berbagai lapisan berkumpul untuk menyampaikan kepentingan mereka, membentuk opini, dan

---

<sup>23</sup> Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (MIT press, 1991)

mencapai tujuan bersama secara diskursif. Ruang publik, dalam konteks ini, menjadi wadah yang mendukung proses demokratisasi dan pertukaran ide yang rasional. Terbentuknya ruang publik ini tidak terlepas dari peran masif orang-orang berstatus “privat” namun kemudian berkumpul menjadi “publik.”<sup>24</sup> Mereka mengambil inisiatif untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka kepada segmen atas dalam masyarakat. Ruang publik muncul sebagai hasil dari aktivitas komunikatif yang intens dan partisipasi masyarakat dalam diskusi dan perdebatan terbuka.<sup>25</sup>

Habermas menginginkan cerminan kondisi ideal dalam masyarakat demokratis, hal ini tentu saja berlatar atas konteks kelompok borjuis atas konstruksi sosial yang sangat terdistorsi dengan kalangan bawah (marginal) saat itu. Kondisi ideal ini digambarkan oleh Habermas sebagai prinsip-prinsip utama yang menandai kesehatan ruang publik. *Pertama*, adalah prinsip kepemilikan hak yang sama untuk ikut partisipasi di ruang publik.

---

<sup>24</sup> Habermas menyatakan, “...*the sphere of private people come together as a public;...*”, Habermas, 27.

<sup>25</sup> Habermas menyatakan, “... *made up of private people gathered together as a public and articulating the needs of society with the state...*”, Habermas, 176.

Tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, gender, atau latar belakang lainnya yang membatasi akses seseorang ke ruang publik. **Kedua**, peluang yang egaliter dalam memperoleh konsensus untuk kemaslahatan publik. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya proses yang adil di mana berbagai perspektif dan pendapat dapat diajukan, didengar, dan dipertimbangkan secara objektif. **Ketiga**, ada regulasi yang mengayomi proses dialog publik dan menghindarkan diskriminasi. Ini berarti bahwa terdapat mekanisme yang menjaga kebebasan berbicara dan partisipasi dalam ruang publik, serta melindungi dari tindakan diskriminatif atau pembatasan yang tidak adil terhadap hak-hak mereka.<sup>26</sup>

Konsep ruang publik memainkan peran krusial dalam konteks pembentukan putusan komunal dan pengawasan sistem dalam masyarakat. Habermas melihat ruang publik sebagai lebih dari sekadar tempat diskusi dan pertukaran ide. Habermas melihat bahwa ruang publik memiliki kapasitas untuk memunculkan dorongan yang kuat dalam mencapai konsensus yang menguntungkan

---

<sup>26</sup> Habermas, 36–37.

masyarakat secara keseluruhan. Ruang publik menjadi panggung tempat berbagai macam pandangan dan pendapat dapat diungkapkan secara terbuka. Di samping itu, ruang publik juga memiliki peran penting sebagai alat pengawasan terhadap sistem yang mengelola urusan kemasyarakatan. Ini merupakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memeriksa dan mengevaluasi tindakan atau entitas yang berwenang. Pengawasan ini merupakan elemen kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat demokratis.<sup>27</sup>

Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan akses ke ruang publik, tekanan, dan kultur sosial dapat menjadi tantangan dinamika yang cukup runyam. Namun, konsep ruang publik ini tetap menjadi pijakan yang penting untuk memahami peran kritis, konteks penelitian ini adalah kaum perempuan atau Muslimah Jawa yang tercermin melalui *Pawestren*, dalam proses pembentukan kebijakan dan akses kesetaraan. Dengan berpijak pada prinsip-prinsip teoritis Habermas, Peneliti melihat bagaimana

---

<sup>27</sup> Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (John Wiley & Sons, 2015), 359–60

dialog dan komunikasi yang terjadi di antara kelompok perempuan yang termaginalkan dengan lebih komprehensif.

## 2. Teori Standpoint

Perspektif yang diusung oleh Harding, *Standpoint Theory*, merupakan sebuah kerangka kerja penting dalam konteks analisis kelompok marginal dan dominan dalam masyarakat, khususnya dalam konteks diskursus kajian gender/feminisme.<sup>28</sup> Teori *Standpoint* menyoroti adanya dikotomi dalam posisi dan pengalaman antara kelompok-kelompok yang berada di "pinggiran" masyarakat dan kelompok yang lebih superior. *Standpoint* (atau *viewpoint*, *perspective*, *outlook*, *position*) mengacu pada posisi sosial, pengalaman, dan perspektif unik yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut.<sup>29</sup>

Teori *Standpoint* punya pandangan yang dalam menelaah kompleksitas dinamika sosial. Kelompok marginal bisa menyuguhkan pandangan yang berbeda dan lebih progresif mengenai

---

<sup>28</sup> Sandra Harding, "Rethinking Standpoint Epistemology: What Is 'Strong Objectivity'?" in *Feminist Epistemologies* (Routledge, 2013), 6

<sup>29</sup> Harding, 54–55.

ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial, dibandingkan dengan kelompok yang lebih dominan. Teori ini menawarkan kaca mata untuk melihat realitas melalui strata sosial bawah. Menurut Harding, perlu ada ruang bagi pengakuan dan pemberdayaan kelompok perempuan, serta pengertian yang lebih baik tentang dampak ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>30</sup>

Dalam arena diskursus gender, terlihat dengan jelas bahwa Teori *Standpoint* lebih banyak menyoroti posisi perempuan dalam masyarakat yang sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan sosial. Dalam dinamika gender yang didominasi oleh laki-laki, perempuan acap kali berada dalam posisi yang lebih tidak diuntungkan dan kurang mendapatkan akses kesetaraan yang sama. Kelompok perempuan kerap diposisikan di luar pusat keputusan dan pembentukan norma-norma sosial. Sebaliknya, laki-laki menjadi kiblat utama, sekaligus mendapatkan *privilege* dalam kelompok masyarakat, dan pengalaman perempuan tidak diindahkan.<sup>31</sup> Amplifikasi suara perempuan

---

<sup>30</sup> Harding, 50.

<sup>31</sup> Elizabeth Hirsh, Gary A. Olson, and Sandra Harding, "Starting From Marginalized Lives: A Conversation with Sandra Harding," *JAC*, 1995, 224.

bahwa pengalaman mereka memiliki nilai dan relevansi yang sama dengan laki-laki diulas dalam teori ini. Kelompok perempuan dimungkinkan untuk menyuarakan perspektif dan menghadirkan terobosan sosial yang sering kali terlupakan.<sup>32</sup>

Kacamata Harding dalam *standpoint theory* adalah buah dari pengaruh pemikiran Marx dan Hegel yang telah merumuskan pandangan yang kuat tentang kuasa dan hierarki dalam masyarakat. Pandangan ini menjadi dasar dalam pemahaman posisi perempuan dalam konteks dominasi gender. Marx, dalam analisisnya tentang "*class struggle*" atau perjuangan kelas, menggunakan terminologi borjuis dan proletar untuk menggambarkan konflik antara kelas dominan dan kelas yang tertindas dalam masyarakat. Dalam konteks Teori *Standpoint*, perempuan diibaratkan sebagai "proletar" yang berjuang melawan diskriminasi gender, mirip dengan perjuangan kelas pekerja dalam pandangan Marx.<sup>33</sup> Sama halnya dengan Hegel mengenai relasi antara majikan dan budak, yang ditandai oleh ketidaksetaraan dalam daya kuasa, juga memengaruhi perspektif Harding.

---

<sup>32</sup> Harding, "Rethinking Standpoint Epistemology," 54.

<sup>33</sup> Harding, 6–7.

Relasi yang tidak mengakui kesetaraan daya kuasa ini mencerminkan realitas dominasi gender di mana perempuan sering kali menjadi kelompok yang tertindas. Perempuan juga sering kali menghadapi pembatasan dalam pengambilan keputusan dan akses ke sumber daya.<sup>34</sup>

Peneliti melihat bahwa kerangka kerja saintifik dalam teori ini menjadi alat yang tepat dalam menguliti fenomena yang diangkat dalam konteks penelitian, yakni negasi kelompok perempuan untuk memperoleh peribadatan publik. Perspektif *Standpoint* dari Harding memudahkan Peneliti untuk melihat bagaimana posisi perempuan dalam membentuk dialog publik sebagai kelompok yang terpinggirkan di tengah dominasi kultur dan dogma agama yang cenderung memberi *privilege* kepada laki-laki.

### **3. Isu Kesetaraan Gender**

Kesetaraan dalam ranah gender menjadi sub-kajian yang selalu hangat untuk dikaji oleh para pemerhatinya. Hal ini selaras dengan kenyataan bahwa kultur patriarki yang mengakar, tidak terkecuali di Jawa, menyuburkan ladang terhadap

---

<sup>34</sup> Harding, 53–56.

akses marginalisasi di sektor gender. Bressler dalam Vioni dan Liansah menjelaskan bahwa sistem patriarki menjadikan laki-laki sebagai tokoh sentral dalam ekosistem sosial, hal ini membawa posisi mereka terhadap perubahan, hak istimewa dan menjadikan posisinya superior.<sup>35</sup>

Manifestasi dari kultur ini menimbulkan berbagai polemik fenomenal, seperti marginalisasi di sektor sosial kemasyarakatan maupun diskriminasi terhadap kelompok yang lebih inferior. Pelbagai bukti faktual dapat disaksikan yang mana menayangkan potret separasi yang bersifat agresif dari kelompok superior terhadap inferior, dalam hal ini laki-laki ke perempuan. Fenomena ini mencerminkan dinamika yang berkaitan dengan dominasi maskulinitas dalam budaya patriarki. Salah satu contoh yang menggambarkan ketidaksetaraan gender ini adalah temuan yang disampaikan oleh Mshweshwe terkait tindak kekerasan domestik.<sup>36</sup> Dalam penjelasannya, Ia mengungkapkan bahwa tindak kekerasan dapat

---

<sup>35</sup> Eliska Vioni and Irene Liansah, "Gender Equality in Patriarchic Culture," in *International Conference on Law Studies (INCOLS 2022)* (Atlantis Press, 2022), 172

<sup>36</sup> Linda Mshweshwe, "Understanding Domestic Violence: Masculinity, Culture, Traditions," *Heliyon* 6, no. 10 (2020): 1–4

tersulut sebagai dampak dari dominasi kultur maskulinitas yang kuat. Dominasi laki-laki sering kali berdampak negatif pada perempuan, khususnya lingkup privat. Hasil dari kultur patriarki ini menciptakan situasi di mana perempuan menjadi pihak yang lebih rentan.

Dalam konteks modern, fenomena diskriminasi gender telah memperluas ruangnya ke ranah daring, menciptakan polemik yang mendalam dalam literatur akademis. Sebagai contoh, Armiwulan menyoroti permasalahan serius terkait akses diskriminasi gender di dunia maya. Khususnya, fenomena *cyber harassment* menjadi sorotan utama, menjadi bentuk pelecehan dan diskriminasi yang muncul melalui platform daring.<sup>37</sup> Akses digital yang semakin meluas memfasilitasi pelaku untuk melakukan tindakan yang merugikan dan merendahkan martabat korban. *Cyber harassment* muncul sebagai fenomena pelik yang merentang di dunia maya, memberikan ruang bagi tindakan pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi yang dapat merugikan kesejahteraan

---

<sup>37</sup> Hesti Armiwulan, "Gender-Based Cyber Violence: A Challenge to Gender Equality in Indonesia," *International Journal of Cyber Criminology* 15, no. 2 (2021): 102.

psikologis dan sosial korban. Pemahaman mendalam tentang dinamika ini menjadi sangat penting untuk menanggapi kausalitas konstruksi kultur terhadap dampak sosial yang dihasilkannya.<sup>38</sup>

Menanggapi pelbagai polemik marginalisasi yang termanifestasi di banyak sektor, Pangestu meliputi bagaimana komunikasi ruang publik dan dialog agitasi yang dicanangkan para pemerhati di lingkup ini. Ia mencatat berbagai respons perlawanan dalam mencegah kemarau panjang bagi korban, yakni kelompok yang mengalami tindak kekerasan atau diskriminasi.<sup>39</sup> Pangestu mencatat bahwa pergelutan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai arena, mulai dari jalanan, ranah akademis dan ruang digital. Ia menerangkan signifikansi dialog dan agitasi publik sebagai wadah untuk menyongsong kesetaraan sosial. Dialog publik dari kelompok “pinggiran” menjadi arena tempat isu-isu sosial dapat dibahas secara terbuka, dan interaksi menjadi sarana untuk merumuskan terobosan, dan

---

<sup>38</sup> Emma A. Jane, “Online Abuse and Harassment,” *The International Encyclopedia of Gender, Media, and Communication* 116 (2020): 9–10

<sup>39</sup> Perdana Putra Pangestu, “Gender, Women and Sexual Harassment: Critical Discourse Analysis in Social Prophetic Perspective,” *Journal of Gender and Children Primacy Studies* 1, no. 1 (2023): 30.

mengubah konstruksi sosial terhadap ketimpangan yang terjadi.<sup>40</sup>

## G. Metode Penelitian

Mengingat esensi penelitian ini, Peneliti berfokus untuk menginvestigasi skema komunikasi ruang publik Muslimah Jawa awal dalam mewujudkan akses peribadatan yang setara dalam konsep *Pawestren*. Penelitian ini digagas melalui metode penelitian analisis-deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Yakni dengan menelusuri aspek yang mengorbit tentang masjid-masjid tradisional di Yogyakarta serta pola komunikasi ruang publik yang dilakukan “para perempuan” atau Muslimah Jawa yang termanifestasi melalui *Pawestren*. Kemudian dilakukan langkah analisis eksploratif untuk memberikan kupasan naratif-obyektif yang mampu menarik simpulan holistik mengenai kajian penelitian ini.<sup>41</sup>

Selanjutnya, pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini berdasar pada perspektif komunikasi, gender dan sosial-budaya. Pendekatan komunikasi ruang publik menjadi tinjauan fundamental dalam memeriksa pola pergulatan Muslimah Jawa yang menunjukkan eksistensinya dalam

---

<sup>40</sup> Pangestu, 36.

<sup>41</sup> Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research* (London: sage, 2011), 3; Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 2

memperoleh akses peribadatan yang setara. Sedangkan pendekatan gender dan sosial-budaya diimplementasikan guna mengetahui konstruksi realitas yang memiliki koneksi atas beberapa aspek sosial, seperti struktur keyakinan, sosial, ekonomi dan politik. Hal ini tentu menjadi unsur komplementer yang signifikan dalam menengok kausalitas pada *Pawestren* sebagai produk dialog Muslimah Jawa di ranah publik.<sup>42</sup>

### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Yogyakarta dengan fokus dalam aspek eksplorasi jejak *Pawestren* dalam konteks empat Masjid Pathok Negara yang menjadi objek penelitian, yaitu Masjid Mlangi, Masjid Plosokuning, Masjid Dongkelan, dan Masjid Babadan. Penetapan keempat masjid ini didasarkan pada pertimbangan yang cermat, mengacu pada kapasitas sebagai masjid-masjid tradisional Jawa ikonik yang memuat peran penting dalam lingkup histori, sosial-budaya masyarakat. Masjid-masjid ini juga menjadi saksi pergulatan publik dan mencerminkan spektrum sosial-budaya yang variatif. Pemilihan lokasi penelitian ini sangat dipertimbangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pengumpulan data yang

---

<sup>42</sup> Nüket Kardam, "The Emerging Global Gender Equality Regime from Neoliberal and Constructivist Perspectives in International Relations," *International Feminist Journal of Politics* 6, no. 1 (January 2004): 97.

mesti Peneliti himpun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, pemilihan keempat masjid ini diharapkan mampu menyuguhkan perspektif yang reflektif mengenai rekaman *Pawestren* dalam menunjukkan jejak dialog dalam mendapatkan akses peribadatan setara bagi kaum perempuan.

Kemudian Peneliti merekam waktu penelitian pada tiga babak kronologi. Tahap pertama merupakan fase persiapan dan orientasi yang dimulai sejak awal bulan November (2023); tahap kedua adalah fase observasi penelitian yang dimulai sejak awal Desember (2023) s.d. Februari (2024); kemudian masuk pada tahap ketiga yang Peneliti usung dengan fase telaah dan sistematisasi data penelitian yang dimulai pada Februari (2024) s.d. Mei (2024). Dengan demikian, Peneliti menghabiskan waktu tujuh bulan semenjak fase persiapan dan orientasi dimulai, hingga tahap finalisasi.

## **2. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini ditetapkan dengan prinsip proporsional dan relevan, sejalan dengan kebutuhan spesifik penelitian. Penetapan klasifikasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kelompok atau individu yang menjadi fokus penelitian dapat memberikan perspektif yang mendalam dan relevan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Pemilihan

subjek penelitian diarahkan untuk menghasilkan data yang sesuai dan konstruktif, khususnya dalam percaturan kelompok perempuan di Yogyakarta dalam ruang publik (masjid). Dengan demikian, pemilihan subjek penelitian bertujuan untuk menjadikan instrumen penelitian lebih terfokus. Subjek penelitian ini menasar beberapa pihak seperti (1) kelompok muslimah yang bermukim di sekitar lokasi penelitian (2) beberapa sejarawan yang bergumul pada disiplin kajian ini, baik yang bernaung dalam institusi kebudayaan setempat maupun para cendekiawan, (2) tokoh masyarakat, dan (3) pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam perolehan data penelitian. Berikut beberapa uraian informan dalam penelitian ini:

No.	Subjek Penelitian	Status
1	Kelompok muslimah di sekitar lokasi penelitian	Primer
2	Pemerhati dan sejarawan di lingkup Dinas Kebudayaan Provinsi D.I. Yogyakarta	Primer
3	Takmir atau <i>Abdi dalem</i> masjid (di lokasi penelitian)	Primer
4	Tokoh masyarakat di sekitar lokasi penelitian	Sekunder
5	Informan lainnya	Sekunder

### 3. Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki objek yang mengorbit pada kajian *pawestren* (di masjid-masjid yang telah ditentukan) dan dinamika komunikasi publik Muslimah Jawa. *Pawestren*, sebagai ruang peribadatan di ranah publik dan ruang berasosiasi bagi Muslimah Jawa, menjadi titik pusat dari penelitian ini.

Lebih khusus, *pawestren* yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah definisi material berupa tempat khusus perempuan di abad ke-21. Biasanya definisi *pawestren* pada periode ini mengarah ke tempat khusus perempuan yang berada di lantai dua sebuah masjid, atau bagian tempat (di ruang utama masjid) yang hanya diberi sekat kain atau bilik tirai. Fokus *pawestren* dalam penelitian ini akan mengarah ke definisi material berupa tempat khusus yang menjadi warisan historis berkenaan dengan eksistensi sebuah masjid itu sendiri, khususnya pada rentang abad ke-17 hingga 20.

Sementara itu, dinamika komunikasi publik Muslimah Jawa yang mencakup berbagai dialog, narasi, dan pola komunikasi dapat mengejawantahkan peran para perempuan di tengah kultur yang dihegemoni kaum pria. Objek penelitian yang terstruktur dengan baik ini diharapkan akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami kompleksitas dan dinamika dari dua aspek

tersebut, menggali wawasan yang mendalam terkait *pawestren* dan komunikasi publik Muslimah Jawa. Keseluruhan, pemilihan objek penelitian ini diarahkan untuk menyelidiki dan mengungkapkan elemen-elemen kunci yang relevan dengan pokok pembahasan, memastikan kedalaman analisis dan kontribusi yang substansial terhadap domain ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bersandar pada pendekatan tersebut, teknik pengumpulan data yang diaplikasikan adalah dengan melakukan observasi (*field research*), wawancara, dan kajian kepustakaan yang lekat dengan kajian komunikasi ruang publik, gender dan konstruksi sosial-budaya yang historis. Hal ini yang dikatakan Cresswell sebagai metode untuk mengkomodasi data penelitian dalam sebuah kerangka narasi dalam studi kualitatif dengan baik.<sup>43</sup>

Patton dalam Subadi dan Raco menyatakan bahwa ada beberapa jenis data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti menyerap jenis data di bawah ini untuk memperoleh unifikasi sumber yang relevan

---

<sup>43</sup> Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial" (Salemba Humanika, 2010), 17; John W. Cresswell, *A Concise Introduction to Mixed Methods Research* (SAGE Publications, 2014), 26–29.

dalam penyusunan penelitian. Jenis data yang dimaksud Peneliti adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a) Observasi kualitatif merupakan salah satu metode pengumpulan data yang mendasarkan diri pada penelusuran dan pengamatan langsung terhadap aktivitas serta realitas sosial yang tengah berlangsung. Metode ini memegang peranan penting dalam upaya memahami karakteristik dan pola yang muncul dalam sebuah situasi sosial (*social setting*) tertentu. Observasi kualitatif memerlukan intensitas dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, yang kemudian dicatat secara teliti dan sistematis. Catatan-catatan ini menjadi landasan untuk merinci temuan dan mengembangkannya menjadi laporan penelitian yang tersusun dengan baik. Melalui metode observasi ini, Peneliti memiliki kesempatan merekam dinamika dan konteks yang mungkin tidak dapat terungkap melalui wawancara atau kuesioner saja. Oleh karena itu, observasi kualitatif memiliki nilai

---

<sup>44</sup> Tjipto Subadi, "Metode Penelitian Kualitatif" (Muhammadiyah University Press, 2006), 66; Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2010), 110–11.

yang signifikan dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena sosial yang menjadi objek penelitian.

- b) Teknik wawancara dilakukan dengan metode *semi-structured* dan terbuka, yang mana akan mengarahkan sesi wawancara dengan informan dengan lebih luwes dan cair. Metode wawancara kualitatif yang diaplikasikan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Dalam *face-to-face interview*, peneliti mengajukan pertanyaan yang dirancang secara cermat, mencakup pertanyaan mayor dan minor yang terkait dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi partisipan untuk memberikan jawaban yang lebih mendalam, mengungkapkan pandangan pribadi, dan berbagi pengalaman. Dengan demikian, tujuan dari penggunaan wawancara kualitatif ini tidak hanya sebatas pada pengumpulan data, tetapi juga bertujuan untuk meraih pemahaman yang lebih kontekstual tentang fenomena yang diteliti.

Proses wawancara kualitatif ini diarahkan untuk membangun narasi penelitian yang kaya dengan perspektif unik dari setiap partisipan, sehingga menghasilkan data yang relevan untuk menginformasikan pemahaman penelitian secara menyeluruh.<sup>45</sup>

- c) Jenis data dokumen melibatkan pencarian dan analisis berbagai sumber informasi, termasuk catatan yang tersedia secara publik maupun catatan yang bersifat privat, serta berbagai literatur yang mengandung data penelitian yang relevan. Penggunaan catatan publik dan privat memberikan fleksibilitas dalam mengakses sumber informasi yang beragam, termasuk dokumen resmi, arsip, dan catatan pribadi yang dapat memberikan wawasan yang berharga. Selain itu, ketersediaan berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian juga menjadi sumber yang sangat berharga untuk mengumpulkan data dan konteks yang diperlukan. Dengan memanfaatkan teknik pengumpulan kepustakaan ini, peneliti memastikan bahwa

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231.

data yang diperoleh mencakup spektrum yang luas dan mendalam, yang dapat digunakan untuk menunjang basis reliabilitas dalam kajian ini, sehingga berfungsi sebagai penebalan atas penelitian yang dilaksanakan.<sup>46</sup>

## 5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, metode pemeriksaan keabsahan data diaplikasikan melalui teknik triangulasi, sebuah pendekatan yang lazim diaplikasikan oleh peneliti dalam konteks penelitian kualitatif. Triangulasi mengacu pada penggunaan berbagai metode, sumber data, atau teori yang variatif untuk memvalidasi keabsahan dan keandalan data yang dikumpulkan. Klasifikasi metode triangulasi dalam tiga jenis:<sup>47</sup>

- a) Triangulasi sumber,
- b) Triangulasi metodologis, dan
- c) Triangulasi teori.

Pendekatan ini menjadi penting dalam memastikan keakuratan interpretasi dan temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan

---

<sup>46</sup> Sugiyono, 240.

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 330; Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 241.

dan sumber data, penelitian ini memastikan bahwa data yang diperoleh lebih kuat dalam mendukung temuan penelitian dan meminimalkan bias yang mungkin muncul. Penerapan teknik triangulasi dalam penelitian ini diarahkan untuk memenuhi standar ketat dalam penelitian kualitatif, memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat diandalkan, konsisten, dan relevan dalam konteks penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Fase analisis data memainkan peran kunci dalam proses penelitian ini dengan tujuan utama menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis dan merinci temuan yang relevan. Menurut Widiawati, tindakan analisis data dilakukan melalui serangkaian langkah yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>48</sup>

- a) Dalam tahap *reduksi data*, data yang telah terkumpul disusun dan disaring dengan cermat, menghilangkan informasi yang tidak relevan atau berlebihan, dan mengidentifikasi pola-pola utama atau tema-tema penting yang muncul dari data.

---

<sup>48</sup> Nani Widiawati, *Metodologi Penelitian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 215–16.

- b) Langkah berikutnya adalah *penyajian data*, di mana data yang telah dianalisis ditempatkan dalam format yang lebih terstruktur, seperti tabel, grafik, atau narasi yang mudah dimengerti. Penyajian data ini membantu dalam visualisasi temuan dan memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan kesimpulan.
- c) Terakhir, tahap *verifikasi* memastikan bahwa hasil penelitian yang ditemukan sesuai dengan data asli dan metode analisis yang digunakan. Fase analisis data ini adalah bagian integral dari proses penelitian, dan penggunaannya yang cermat dan sistematis bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara akurat.

## 7. Sistematika Pembahasan

Peneliti telah merancang penstrukturan yang terdiri dari bab-bab utama serta sub-bab sebagai bagian penjelas dari substansi bab utama. Setiap bab mayor dirancang untuk merinci aspek-aspek penting yang terkait dengan fokus penelitian, sementara sub-bab memberikan pemecahan yang lebih terperinci terhadap elemen-elemen tersebut. Penstrukturan ini menjadi landasan untuk

penyusunan data penelitian secara tertib dan rapi, menjadi instrumen yang mendukung keterhubungan dan kelogisan antara setiap bagian penelitian, memberikan fondasi yang kuat untuk analisis dan interpretasi data.

<p style="text-align: center;"><b>Bab I Pendahuluan</b></p>	<p>Bagian yang ada pada tesis Peneliti dengan pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Bab II Deskripsi <i>Pawestren</i> di Masjid-masjid Pathok Negara Yogyakarta</b></p>	<p>Dalam bab ini, Peneliti menampilkan deskripsi mengenai <i>Pawestren</i> yang berada di Masjid-masjid Pathok Negara Yogyakarta, yang mana menjadi objek dan lokasi dalam penelitian ini. Uraian <i>Pawestren</i> akan dominan di bagian bab ini, dan diikuti dengan paparan Masjid Pathok Negara (secara umum) untuk melengkapinya.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Bab III Dinamika &amp; Komunikasi Ruang Publik Muslimah Jawa dalam <i>Pawestren</i></b></p>	<p>Bagian ini fokus menjabarkan dinamika sosial dan komunikasi ruang publik oleh para perempuan yang termanifestasikan melalui <i>Pawestren</i>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Bab IV Analisis Temuan Dalam Perspektif Teori Komunikasi</b></p>	<p>Peneliti akan melakukan analisis secara lebih komprehensif di bab ini, yakni dengan mengulas data temuan dengan pisau analisis</p>

<b>Ruang Publik &amp; Teori <i>Standpoint</i></b>	teori komunikasi ruang publik dan <i>standpoint</i> .
<b>Bab V: Penutup</b>	Bagian akhir dalam penelitian yang Peneliti susun dengan memberikan kesimpulan serta saran penelitian yang telah digagas.

## BAB II

### DESKRIPSI *PAWESTREN* DI MASJID-MASJID PATHOK NEGARA YOGYAKARTA

#### A. Sekilas tentang *Pawestren*

*Pawestren* merupakan salah satu bagian dalam bangunan masjid-masjid tradisional di Jawa yang dikhususkan untuk ruang peribadatan perempuan. *Pawestren* berasal dari kata *estri* yang berarti perempuan, yang kemudian mendapatkan imbuhan “pa .... an” yang mengisyaratkan sebuah tempat. *Paistrian* kemudian akrab diucapkan dengan sebutan *pawestren*.<sup>49</sup> Meskipun demikian, terdapat beberapa variasi penyebutan untuk *pawestren*, seperti *Pewadonan*, *Kapustren*, *Palastren*, hingga Masjid *Wedok*.<sup>50</sup>

Keunikan *Pawestren* terletak pada ranah fungsional yang bersifat eksklusif, tempat ini dirancang steril dari keberadaan laki-laki meskipun ia bertindak sebagai seorang imam,

---

<sup>49</sup> M. Burhanudin, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Wawancara interaktif, February 2, 2024.

<sup>50</sup> Lihat misalnya dalam, Abdul Hakim, “Akulturasi Budaya Bangunan Masjid Tua Cirebon Studi Pada Masjid Kaliwulu, Plered,” *Suhuf* 4, no. 2 (2011): 295; Novita Siswayanti, “Akulturasi Budaya Pada Arsitektur Masjid Sunan Giri,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 14, no. 2 (2016): 314; Dewi Adityaningrum, Wiwik Setyaningsih, and Avi Marlina, “Pola Tata Ruang Masjid Kerajaan Di Surakarta,” *Senthong* 2, no. 2 (2019): 843.

menjadikannya ruang yang sepenuhnya disisihkan dan direservasi untuk ibadah jamaah perempuan.<sup>51</sup>

Berdasarkan penuturan Eryzona, *pawestren* (terutama yang terdapat di Masjid Gedhe Kauman) awalnya muncul sebagai wadah khusus untuk memfasilitasi kalangan perempuan dari keluarga kerajaan agar dapat melaksanakan ibadah di dalam masjid. Konstruksi *pawestren* yang dirancang secara permanen dengan adanya sekat dinding, bertujuan untuk menjaga privasi dan keamanan. Alasan di balik pembangunan *pawestren* ini menjadi jelas, yaitu untuk memberikan ruang eksklusif kepada perempuan dari keluarga kerajaan agar dapat melangsungkan ibadah di masjid.<sup>52</sup> Situasi serupa juga terjadi di Masjid Pathoknegaran, di mana awalnya *pawestren* diperuntukkan bagi kalangan perempuan dari keraton yang melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Namun, karena frekuensi kunjungan yang terbatas, *pawestren* di Masjid Pathoknegaran kemudian dioperasikan untuk perempuan umum. Hal ini menunjukkan adaptasi dan evolusi fungsi *pawestren* sesuai dengan kebutuhan dan dinamika aktivitas di dalam masjid, mengarah pada

---

<sup>51</sup> Dwindi Ramadhana and Atyanto Dharoko, "Ruang Sakral Dan Profan Dalam Arsitektur Masjid Agung Demak, Jawa Tengah," *INERSIA Lnformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur* 14, no. 1 (2018): 20.

<sup>52</sup> Husaein Eryzona, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Wawancara interaktif, February 6, 2024.

penggunaan ruang yang lebih inklusif untuk masyarakat umum, khususnya perempuan.

Signifikansi *Pawestren* juga tercermin dalam perspektif syariat. Sebagai tempat yang eksklusif, *Pawestren* memfasilitasi prinsip syariat dengan memberikan ruang bagi jamaah perempuan untuk membuka aurat untuk urusan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa *Pawestren* bukan hanya sebagai tempat ibadah konvensional, tetapi juga menjadi tempat yang mempertimbangkan etika dan tata krama dalam beribadah.

Produk arsitektural ini juga dinyatakan Arafat sebagai manifestasi “*Fiqh Kewalian Jawa*” atas ijtihad yang mereka lakukan sebagai dakwah kultural. Eksistensi *pawestren* di masjid-masjid Jawa tidak lepas dari peranan ulama setempat waktu itu dalam menyematkan nilai-nilai kosmologis yang sarat dengan elemen transendental. Hal ini juga dapat dipadankan dengan falsafah dibalik pintu masuk masjid (*gapura*) atau kolam yang mengitari masjid (*blumbang*) yang tercipta secara tidak instan.<sup>53</sup> Kedudukan *pawestren* pun dinyatakan oleh Ramadhana sebagai tempat yang sakral, sebagaimana *Liwan* (ruang ibadah utama untuk jamaah laki-laki) dalam masjid-masjid tradisional

---

<sup>53</sup> *Gapura* memuat konsep falsafah Tuhan yang Maha Pengampun (*al-ghafur*), sedangkan *blumbang* memuat konsep singgasana Tuhan (*arsy*) yang berada di atas air. Konsep ini, secara tidak langsung, menjadi produk dakwah kultural yang ingin disampaikan para ulama kepada masyarakat awam. Yaser Arafat, Budayawan Jawa Matraman, Wawancara interaktif, January 31, 2024.

Jawa.<sup>54</sup> Simpulan ini berangkat dari beberapa alasan mendasar, seperti perspektif fungsional bahwa ruang ini menjadi tempat ibadah, tempat privat bagi perempuan, serta terjaganya lalu-lalang jamaah yang berhadad.

Ruang pemisah peribadatan (salat) antara laki-laki dan perempuan ini biasanya menggunakan pemisah yang kokoh, misalnya tembok atau bahkan terpisah dari bangunan ruang masjid utama. Misalnya tembok *aling-aling* dari marmer yang dapat ditemui dalam *pawestren* di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, atau sekedar tembok biasa yang dapat ditemui di Masjid Pathoknegaran. Letak area *Pawestren* tidak menentu di banyak kasus masjid. Adanya distingsi ini dinyatakan Wiryoprawiro sebagai ketentuan yang tidak paten, yang mana cenderung pada alasan fikih seperti masalah kekhusyukan ibadah atau jarak dengan tempat wudu.<sup>55</sup> Penelusuran Aryanti menengarai bahwa ada perbedaan kultur wilayah pesisir dan pedalaman dalam hal letak strategis *Pawestren* sebuah masjid. Daerah pesisir cenderung ditemui *Pawestren* yang berlokasi terpisah di sebelah kanan *Liwan*, berbeda dengan wilayah

---

<sup>54</sup> Ramadhana and Dharoko, "Ruang Sakral Dan Profan Dalam Arsitektur Masjid Agung Demak, Jawa Tengah," 24.

<sup>55</sup> Zein. M Wiryoprawiro, *Perkembangan Arsitektur* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 168.

pedalaman yang umumnya ditemui di belakang *Liwan*.<sup>56</sup> Temuan ini juga tidak dapat digeneralisasi, sebab kebanyakan masjid mengikuti struktur masjid besar atau masjid agung milik kerajaan setempat, sebagaimana Masjid Pathoknegaran yang mengikuti Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, dan merujuk pada Masjid Agung Demak dalam pakem arsitekturalnya.<sup>57</sup>

Dalam proporsi fisik, *Pawestren* tidak mendominasi dalam struktur bangunan di masjid. Secara proporsional, luas bangunan *Pawestren* cenderung lebih kecil dibandingkan dengan luas *Liwan*, ruang utama masjid untuk jamaah laki-laki. Peneliti rasa proporsi ini mencerminkan hierarki ruang dalam arsitektur masjid tradisional yang memposisikan *Liwan* sebagai ruang utama dan *Pawestren* sebagai ruang tambahan. Fakta ini juga menguat ketika ditemui bahwa *Pawestren* merupakan wujud bangunan baru yang muncul belakangan selang beroperasionalnya masjid dalam kurun waktu tertentu. Hermanto & Yuniati mencatat bahwa *Pawestren* menjadi bagian baru dalam struktur arsitektural Masjid Agung Surakarta di tahun 1850 M,

---

<sup>56</sup> Tutin Aryanti, "The Center Vs. The Periphery in Central-Javanese Mosque Architecture," *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)* 34, no. 2 (2006): 75.

<sup>57</sup> Denny Huldiansyah and Tarcicius Yoyok Wahyu Subroto, "Konsistensi Ruang Pangimaman, Liwan, Dan Pawestren Di Masjid Pathok Negara Ad-Darajat Babadan, Bantul, Yogyakarta (1970-2019)," *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur* 5, no. 2 (2020): 182; Inajati Adrisijanti, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam* (Yogyakarta: Jendela, 2000), 15.

yakni saat Sri Susuhunan Pakubuwono VII (1830-1875 M) memegang tampuk kekuasaan Kasunanan Surakarta. Hal ini terlampaui jauh dari titik pembangunan awal masjid tersebut di masa Pakubuwana II pada 1745 M.<sup>58</sup> Selaras dengan laporan Hernawan, dkk. bahwa pembangunan susulan *Pawestren* juga terjadi di Masjid Agung Cirebon dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Sejak tahun 1480 M yang menjadi awal pembangunan masjid tersebut, *Pawestren* menjadi rangkaian pengembangan yang direalisasikan tahun 1930 M di masa pemerintahan Sultan Jamaludin Aluda Tadjularifin (1899-1942 M).<sup>59</sup>

Pada Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, pembangunan *pawestren* belakangan juga dapat ditemui. Tahun 1839 M, masa kepemimpinan Hamengkubuwono V, menandai pembangunan bagian tersebut. Nomenklatur yang terpampang di pintu utama *pawestren* Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta ini terbilang jauh

---

<sup>58</sup> Heri Hermanto and Atinia Hidayah, "Masjid Nabawi Sebagai Dasar Pembentukan Masjid Agung Kraton Surakarta," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 9, no. 1 (2022): 62; Lilis Yuniati, "Pengaruh Kepemimpinan Keraton Pada Arsitektur Masjid Agung Surakarta," in *Prosiding Seminar Heritage IPLBI*, 2017, 451

<sup>59</sup> Wawan Hernawan, Busro Busro, and Mudhofar Muffid, "Suluk Pesisiran Dalam Arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, Indonesia: Suluk Pesisiran in The Architecture of The Masjid Agung Sang Cipta Rasa of Cirebon-Indonesia," *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi* 10, no. 1 (2021): 321.

dari awal pembangunan masjid tersebut yang dibangun pada masa Hamengkubuwono I di tahun 1773 M.

Meskipun difungsikan sebagai ruang salat eksklusif bagi perempuan, *Pawestren* kemudian juga memiliki kapasitas yang jauh lebih luas dan progresif. Fungsinya berkembang dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat kegiatan yang mendukung intensifikasi kelompok muslimah. Tidak hanya terdengar suara dzikir dan bacaan salat, tetapi juga gemuruh musyawarah dan pengajian yang menjadi landasan pengembangan kelompok perempuan. *Pawestren* muncul sebagai pusat aktivitas progresif yang melibatkan perempuan dalam kegiatan publik.<sup>60</sup>

Dengan berkembangnya fungsi *Pawestren* dari ruang salat menjadi pusat aktivitas progresif, Peneliti melihat bagaimana ruang ini tidak hanya memenuhi kebutuhan ibadah, tetapi juga menjadi panggung bagi perkembangan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks lokal. *Pawestren* menjadi pusat kegiatan yang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan keagamaan, menjadikannya elemen vital dalam konstruksi ruang publik bagi kelompok perempuan. Perkembangan *Pawestren* tidak lepas dari perubahan dan mengikuti dinamika serta perubahan kultur di masyarakat. Seiring berjalannya waktu pergeseran dalam segi fungsi terjadi, *Pawestren* yang semula

---

<sup>60</sup> Siswayanti, "Akulturasi Budaya Pada Arsitektur Masjid Sunan Giri," 321.

menjadi tempat khusus bagi jamaah perempuan mulai mengalami alih fungsi dalam berbagai kepentingan. Sebaliknya, jamaah perempuan kini ditempatkan di ruang utama masjid dengan sekat berupa tirai kain, atau di balkon lantai dua sebuah masjid, sebagai upaya untuk menciptakan pemisahan yang tidak seketat pada masa sebelumnya.<sup>61</sup>

## **B. Sejarah Konsep Masjid-masjid Pathoknegaran di Yogyakarta**

Wilayah Kesultanan Yogyakarta memiliki ciri khas konsep kultural mengenai pola tata ruang yang termanifestasi melalui Masjid Pathoknegaran dengan corak akulturasi Islam, Hindu dan Jawa.<sup>62</sup> Menurut Poerwodarminta, dkk. beragam definisi konseptual mengenai Pathoknegaran. Dalam hal ini, Pathoknegaran berasal dari bahasa Jawa, *pathok* dan *negara*, yang berarti batas dari kewilayahan atau juga aturan hukum yang dianut oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.<sup>63</sup> Dalam

---

<sup>61</sup> Aryanti, "The Center Vs. The Periphery in Central-Javanese Mosque Architecture," 75; Husaein Eryzona, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Wawancara interaktif.

<sup>62</sup> Muhammad Nur Hakimuddin At-Toyibi and Dyah Titisari Widyastuti, "Karakter Arsitektur Masjid Jawa Pada Masjid Pathok Negro," *Jurnal Arsitektur Pendapa* 4, no. 2 (2021): 23–24.

<sup>63</sup> Wilfridus Josephus Sabarija Poerwodarminta, C. S. Hardjasoedarma, and J. Chr Poedjasoedira, *Baoesastra Djawa* (Groningen-Batavia: J.B. Wolters, Uitgevers Maatschappij NV., 1939), 479; Nur Aini Sulistyowati and Heri Priyatmoko, *Toponim Kota Yogyakarta* (Yogyakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), 44.

pengertian ini, Pathoknegaran tidak hanya mencakup dimensi geografis sebagai suatu batas wilayah tetapi juga melibatkan dimensi hukum dan aturan yang menjadi landasan kerajaan.

Definisi mengenai Pathoknegaran tidak dapat dipisahkan dari keberadaan *Pengadilan Surambi*, sebuah lembaga yang bertugas menangani isu-isu keumatan berdasarkan hukum Islam dan eksis di awal pemerintahan Hamengkubuwono I sejak *Palihan Nagari* atas Perjanjian Giyanti tahun 1755 M. *Pengadilan Surambi* menjadi pusat penyelesaian masalah keagamaan dan hukum Islam di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Peran *Kyai Pengulu*, yang merupakan jabatan yang ditunjuk langsung oleh raja, sangat signifikan dalam menjalankan fungsi lembaga ini.<sup>64</sup> Untuk mendukung peran *Pengadilan Surambi*, *Kyai Pengulu* didukung oleh para *pathok nagara*, *abdi dalem* yang memiliki keahlian dalam ilmu agama dan syariah. Mereka tersebar di empat titik strategis yang menjadi poros utama, yaitu di Mlangi, Plosokuning, Babadan, dan Dongkelan. Keberadaan *pathok nagara* di keempat lokasi tersebut memberikan dukungan intelektual dan keilmuan yang diperlukan untuk menangani

---

<sup>64</sup> Samrotul Ilmi Albiladiyah, "Sekilas Tentang Pathok Nagara," *Jantra* 1, no. 1 (2006): 13–15; Anton Satyo Hendriatmo, *Giyanti, 1755: Perang Perebutan Mahkota III dan Terbaginya Kerajaan Mataram Menjadi Surakarta dan Yogyakarta* (Tangerang: CS Books, 2006), 138–39.

permasalahan hukum dan keagamaan di wilayah Pathoknegaran.<sup>65</sup>

Pada masa itu, para *pathok nagara* bukan hanya memiliki peran sebagai ahli hukum agama dan syariah, namun juga dianggap sebagai teladan bagi umat dan bertanggung jawab atas aspek keagamaan di kawasan masing-masing.<sup>66</sup> Tanggung jawab mereka mencakup pemimpin spiritual dan intelektual dalam bidang agama, mencerminkan peran yang sangat penting dalam mengawasi dan membimbing umat di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.<sup>67</sup> Keberadaan para *pathok nagara* tidak hanya mencerminkan keahlian hukum agama, tetapi juga menggambarkan kompleksitas sistem nilai dan aturan yang mengatur kehidupan keagamaan masyarakat. Mereka menjadi bagian integral dari tata ruang keagamaan yang mengarahkan norma-norma dan nilai-nilai keislaman di wilayah tersebut. Terminologi "*pathok nagara*" juga merujuk pada masjid-masjid

---

<sup>65</sup> Tim Museum Sonobudoyo, *Masjid-Masjid Pathok Negoro Di Kesultanan Yogyakarta* (Yogyakarta: Museum Sonobudoyo Kraton Yogyakarta, 2009), 54.

<sup>66</sup> Ismanto Ismanto and Suparman Suparman, "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (2019): 73–75.

<sup>67</sup> Menurut penuturan Arafat dalam perspektif kosmologi Islam-Jawa, para *pathok nagara* juga dapat disebut "wali kutub", "kyai khos", "mursyid" (dalam perspektif tarekat), atau "*wilayah al-faqih*" (dalam perspektif *fiqh* Iran) yang menaungi wilayah yang ditempatinya. Yaser Arafat, *Budayawan Jawa Matraman*, Wawancara interaktif.

Pathoknegaran yang menjadi pusat pendidikan dan penguatan karakter islami.<sup>68</sup>

Status istimewa Masjid-masjid Pathoknegaran sebagai bangunan yang berdiri di atas tanah *perdikan*, yang merupakan lahan yang dihadiahkan oleh pihak keraton, didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti menjadi tempat pemakaman bagi keluarga kerajaan, kediaman bagi individu yang dianggap penting oleh keraton, serta sebagai pusat pendidikan keagamaan. Keistimewaan ini dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan Hamengkubuwono I karena masih ada pertalian darah dengan pejabat awal Masjid Pathoknegaran (Kyai Nur Iman Mlangi), yang mana kemudian dituangkan oleh Hamengkubowono II dalam pernyataan resmi. Masa itu mencerminkan kesadaran akan pentingnya mendukung dan memperkuat lembaga keagamaan di dalam wilayah kekuasaan keraton.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Desy Ayu Krisna Murti and Ahmad Sarwadi, "Pathok Negoro: The Islamic Settlements in Modern Society," in *EduARCHsia & Senvar 2019 International Conference (EduARCHsia 2019)* (Atlantis Press, 2020), 156

<sup>69</sup> Tim Museum Sonobudoyo, *Masjid-Masjid Pathok Negoro Di Kesultanan Yogyakarta*, 48–49.

Keberadaan Pathoknegaran terletak dengan acuan batas wilayah antara *kuthanegara* dan *negaragung*,<sup>70</sup> yang berpenjuru pada empat mata angin, (1) Masjid Mlangi untuk batas barat, (2) Masjid Plosokuning untuk batas utara, (3) Masjid Babadan untuk batas timur, dan (4) Masjid Dongkelan untuk batas selatan. Ide filosofis penempatan Masjid Pathoknegaran yang terletak di keempat penjuru mata angin dapat didasarkan pada beberapa tesis yang juga saling koheren. *Pertama*, ini bisa dirujuk pada filosofi Jawa kuno “*kiblat papat lima pancer*”.<sup>71</sup>

Konsep ini tidak hanya menjadi ide kosmologis, namun juga memiliki keterkaitan dengan keterangan yang terdapat dalam *Suluk Sujinah* yang disampaikan oleh Arafat.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Kuthanegara* adalah wilayah inti pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, zona di mana keraton, rumah keluarga, dan pejabat tinggi kerajaan berada. Sedangkan *Negaragung* merupakan cakupan teritorial yang lebih luas (pada masa pemerintahan Mataram Islam), di mana *kuthanegara* juga masuk dalam kawasan *negaragung* tersebut. Lihat melalui penelusuran, Agustinus Supriyono Sugiyarto and Endah Sri Hartatik, “Nobility and Land System in the Pre-Colonial Era of the Surakarta and Yogyakarta Kingdoms,” *Paramita: Historical Studies Journal* 30, no. 2 (2020): 211.

<sup>71</sup> Jakob Sumardjo, *Arkeologi Budaya Indonesia, Pelacakan Hermeneutis-Historis Terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: PENERBIT QALAM, 2002), 60; Endang Setyowati, Gagoek Hardiman, and Titin Woro Murtini, “Pathok Negero Mosque as the Form of Territorial Defense Region of Mataram Kingdom of Islam Java in Jogjakarta,” in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 106 (IOP Publishing, 2018), 1

<sup>72</sup> Pemetaan ini secara kongkrit mengaitkan posisi geografis Masjid Pathoknegaran dengan keempat mazhab tersebut, menciptakan sebuah simbolisme yang sarat makna. Konsepsi ini menyuguhkan

Menurutnya, Masjid Pathoknegaran dapat dianggap sebagai representasi dari keempat mazhab dalam kajian *fiqh* Islam. Yakni Masjid Babadan mewakili Imam Syafi'i; Masjid Dongkelan diwakili Imam Hanbali; Masjid Mlangi menjadi simbol Imam Maliki; dan Masjid Plosokuning mempresentasikan Imam Hanafi.

*Kedua*, konsep penempatan Masjid Pathoknegaran juga bisa dirujuk pada pola lingkaran konsentris sebagai manifestasi doktrin Mandala, *Manunggaling Kawulo Gusti*.<sup>73</sup> Prinsip ini sarat makna dengan keselarasan makrokosmos dengan mikrokosmos (rakyat dan pemerintah), yang juga memperhatikan keharmonisan perkotaan dan pedesaan, dengan titik pusat di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta.<sup>74</sup> Ini juga erat dengan habituasi etik ketika raja tengah menggelar pertemuan

---

perspektif menarik mengenai relasi antara kultur lokal dengan berbagai konsep fundamental dalam Islam, yang mana tidak hanya menjadi aspek kosmologis, namun cerminan atas kompleksitas keagamaan dan tafsir corak Jawa. Yaser Arafat, *Budayawan Jawa Matraman*, Wawancara interaktif.

<sup>73</sup> Silvia Meliana and Octaviana Sylvia Caroline, "A Review of the Role of Intangible Axis toward the Pathok Negoro's Design Concept, Yogyakarta," *Humaniora* 11, no. 3 (2020): 170.

<sup>74</sup> Cindy Aprilia Palupi, "Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta Dalam Aspek Nilai Budaya Lokal," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2021): 63.

dengan para *abdi dalem* yang membentuk lingkaran konsentris mengelilingi singgasana raja.<sup>75</sup>

Hubungan antara Masjid-masjid Pathoknegaran dan Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan yang koheren. Dalam konsep arsitekturalnya, Masjid-masjid Pathoknegaran mengikuti garis arsitektur yang diusung oleh Masjid Gedhe Kauman, yang juga merujuk ke Masjid Agung Demak di Jawa Tengah. Sebagai representasi keraton, Masjid-masjid Pathoknegaran membawa nilai-nilai kultural dan keagamaan yang dianut oleh keraton ke wilayah yang terletak jauh secara teritorial.<sup>76</sup> Adanya pengaruh arsitektural yang merujuk pada Masjid Gedhe Kauman, menunjukkan bahwa Masjid-masjid Pathoknegaran, sebagai perpanjangan dari keraton, berperan sebagai penyampai nilai-nilai kultural dan keagamaan ke masyarakat. Struktur dan desain arsitekturalnya menjadi cerminan dari cara keraton memproyeksikan citranya ke dalam masyarakat yang berada di bawah naungannya. Dengan demikian, secara struktural dan politis, keraton menggunakan Masjid-masjid Pathoknegaran

---

<sup>75</sup> Robert Heine Gelderen, *Konsepsi Tentang Negara Dan Kedudukan Raja Di Asia Tenggara, (Terj. Deliar Noer)* (Jakarta: Rajawali, 1982), 11–12.

<sup>76</sup> Adrisijanti, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*, 15; Bambang Setia Budi, “A Study on the History and Development of the Javanese Mosque,” *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* 4, no. 1 (May 1, 2005): 6–7, <https://doi.org/10.3130/jaabe.4.1>.

sebagai perpanjangan tersebut, sebagai sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi bagian integral dari identitas keraton. Untuk melihat bagaimana potret dari masing-masing Masjid Pathoknegaran, Peneliti memberikan ringkasan berikut,

### **1. Masjid Mlangi**

Masjid Mlangi bertempat di Dsn. Mlangi, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman. Masjid Pathoknegaran pertama ini didirikan pada 1723 M di tanah perdikan oleh Bendoro Pangeran Hangebehi Sandiyo, atau lebih dikenal dengan Kyai Nur Iman.<sup>77</sup> Tanah ini merupakan bentuk penghormatan dari Hamengkubowono I atas peran Kyai Nur Iman dalam meredam kesumat internal keraton, serta dedikasinya melakukan syiar Islam. Tanah Mlangi pun memiliki beberapa akar inspirasi yang cukup menarik. Salah satunya adalah yang

---

<sup>77</sup> Tahun 1723 M tertera melalui rujukan penemuan umpak tiang Masjid Mlangi pada sisi barat daya ruang utama masjid saat dilakukan pemugaran tahun 1981 M. Lihat pada, “Jogjacagar | Sistem Informasi Cagar Budaya,” accessed December 15, 2023; Murti and Sarwadi, “Pathok Negoro,” 156; Sedangkan beberapa literatur menyebutkan bahwa Masjid Mlangi didirikan pada tahun 1776 M, menyusul diangkatnya Hamengkubuwono I menjadi raja. Lihat pada, Endang Setyowati et al., *Mengenai Lebih Jauh Masjid Islam Jawa: Dalam Arsitektur Masjid Pathok Negoro* (GalangPress, 2017), 90; C. D. A. Depari, “Pengaruh Islam Terhadap Rencana Kota Yogyakarta,” *Konservasi Arsitektur Kota Yogyakarta*, 2013, 23.

terkait dengan terminologi dalam bahasa Jawa, yaitu "*mulangi*," yang merujuk pada pengajaran ajaran agama Islam kepada santri atau masyarakat oleh Kyai Nur Iman.<sup>78</sup>

Morfologi Masjid Mlangi mengalami perubahan yang cukup kentara, terutama saat padarnya perhatian keraton terhadap manajemen dan inventaris, akibat sibuknya urusan semasa pendudukan Belanda. Hal ini kemudian membuka perspektif pengelolaan oleh masyarakat yang ingin meyingkirkan nilai kebudayaan dalam masjid, yakni dengan meyingkirkan sektor-sektor yang dianggap *khurafat* dan *bid'ah*. Namun mulai Hamengkubuwono IX menjabat, khususnya muncul UU Keistimewaan DIY No. 13 Tahun 2012, realisasi untuk merestorasi Masjid Mlangi ke arsitektur awalnya yang sarat dengan nafas kultur Jawa dilakukan.<sup>79</sup>

Masjid Mlangi memiliki dua sektorisasi, yakni dalam serta luar. Sektor utama (dalam)

---

<sup>78</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, "Pesantren Mlangi: Poros Spiritual Intelektual Islam Di Yogyakarta Abad XVIII–XIX M," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2020, 229–31.

<sup>79</sup> Setyowati et al., *Mengenal Lebih Jauh Masjid Islam Jawa*, 90–93; Husaein Eryzona, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Wawancara interaktif.

menjadi tempat pokok peribadatan dan aktivitas jamaah, mencakup *Pangimaman* (tempat Imam), mimbar dan ruang salat utama (*Liwan* dan *Pawestren*). Sektor luar sendiri terdiri atas serambi, kolam serta tempat wudlu. Bagian *Pawestren*, atau yang disebut dengan *Kapustren* (pada Masjid Pathoknegeran Mlangi) memiliki ketinggian 3 - 4 m, dengan wujud atap kayu, tembok serta bebaran lantai keramik berwarna kuning.

## 2. Masjid Plosokuning

Masjid Plosokuning berlokasi di Dsn. Plosokuning, Ds. Plosokuning, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman. Masjid Plosokuning, atau yang juga biasa disebut dengan Masjid Sulthoni, berdiri pada 1724 M atas perintah Kyai Nur Iman Mlangi kepada putranya, Kyai Mursodo.<sup>80</sup> Penamaan pada Masjid Plosokuning terinspirasi dari keberadaan pohon ploso berwarna kuning yang dulu berada di selatan masjid.<sup>81</sup>

Sama halnya dengan Masjid Mlangi, komponen masjid dibagi atas dua sektor, yakni

---

<sup>80</sup> Sharifah Nafisyah, "Masjid Pathok Negero Sulthoni Sebagai Pusat Akulturasi Budaya (1976-2000)," *Risalah* 2, no. 8 (2016): 7–8

<sup>81</sup> Setyowati et al., *Mengenal Lebih Jauh Masjid Islam Jawa*, 56–60.

sektor dalam dan sektor luar. Sektor dalam di Masjid Plosokuning difungsikan sebagai bagian inti yang digunakan untuk peribadatan, meliputi *Pangimaman*, mimbar dan ruang salat utama (*Liwan* dan *Pawestren*). Sedangkan untuk sektor luar di masjid mencakup serambi, kolam dan tempat wudlu. Dari keseluruhan Masjid Pathoknegaran, Masjid Plosokuning ini merupakan masjid yang belum pernah mengalami restorasi dan dianggap masih asli dan orisinal.<sup>82</sup> Untuk *Pawestren*-nya sendiri berukuran 9,25 x 3 m<sup>2</sup> dengan ketinggian sekitar 2 - 3 m, serta konstruksinya yang beralaskan keramik, tembok serta beratap kayu. *Pawestren* sendiri kini murni difungsikan sebagai tempat peribadatan jamaah perempuan meskipun hanya difungsikan saat salat lima waktu saja.

Aktivitas publik yang aktif dilakukan di Masjid Plosokuning mencakup beragam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang menjadi inti kehidupan komunitas di sekitarnya. Mulai dari salat berjamaah, pengajian berupa *tahlilan* dan *istighotsah*, hingga syukuran masyarakat seperti

---

<sup>82</sup> Husaein Eryzona, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Wawancara interaktif.

*kenduren* dan *slametan*, semuanya diadakan secara rutin. Pengajian tidak hanya terbatas pada perayaan hari besar agama, tetapi juga dilakukan secara rutin sebagai bagian dari kegiatan musyawarah masyarakat. Keterlibatan masjid dalam urusan kemasyarakatan, seperti pernikahan dan kematian, juga diwadahi oleh masjid.<sup>83</sup>

Dalam konteks khusus untuk jamaah perempuan, Masjid Plosokuning mengakomodasi kebutuhan mereka dengan mengadakan pengajian dan pengembangan pada waktu rabu malam (atau disebut “malam kamis”). Pengajian ini diselenggarakan dengan merangkul berbagai topik yang relevan dengan aspek keagamaan dan kemuslimah-an. Pengajian yang diperuntukkan bagi jamaah perempuan memuat berbagai topik yang berkenaan dengan agama maupun topik kemuslimah-an dengan pembimbing dari pengajar (ustaz) setempat.<sup>84</sup>

Inisiatif ini mencerminkan upaya masjid dalam memberikan ruang dan dukungan untuk

---

<sup>83</sup> Kamaludin Purnomo, Takmir Masjid Plosokuning, Wawancara interaktif, January 26, 2024.

<sup>84</sup> Kamaludin Purnomo, Takmir Masjid Plosokuning; Sumiati, Warga Muslimah, Wawancara interaktif, January 26, 2024.

pengembangan spiritual dan keilmuan jamaah perempuan, sehingga menjadikan Masjid Plosokuning sebagai pusat yang inklusif dan peduli terhadap kebutuhan komunitasnya. Kesemua aktivitas tersebut ditujukan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan kualitas pengalaman religius bagi masyarakat sekitar.

### 3. Masjid Babadan

Masjid Babadan terletak di Dsn. Babadan, Ds. Gedhongkuning, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul. Masjid Babadan berdiri pada 1774 M atas amanah Kyai Nur Iman Mlangi kepada anaknya, Kyai Nur Iman Besari.<sup>85</sup>

Masjid yang juga dikenal dengan Masjid ad-Darojat ini, melalui dinamika historis yang cukup menarik,<sup>86</sup> terutama semasa pendudukan Jepang. Alih fungsi Masjid Babadan menjadi gudang mesiu bagi arsenal Jepang membuat masyarakat sekitar harus dipindahkan ke wilayah Babadan Baru.

---

<sup>85</sup> Setyowati et al., *Mengenal Lebih Jauh Masjid Islam Jawa*, 143.

<sup>86</sup> Nama ini dinisbahkan kepada nama masa kecil Hamengkubuwono IX, yakni BRM Darojatun, karena memberikan atensi besar atas rekonstruksi Masjid Babadan yang sempat terabaikan. Baca dalam, Setyowati et al., 144.

Kebijakan relokasi ini membuat Babadan Lama menjadi terisolasi, termasuk Masjid Babadan yang hanya meninggalkan fondasi dan tembok. Tahun 1960, melalui Kyai Muthohar dan dukungan Hamengkubuwono IX, muncul inisiasi untuk membangun kembali Masjid Babadan (di wilayah Babadan Lama) yang sebelumnya digunakan sebagai arsenal Jepang.<sup>87</sup>

Selain menjadi tempat ibadah dan penyiaran ajaran agama, Masjid Babadan juga memainkan peran penting sebagai tempat komunal yang mendorong aktivitas diskusi, rapat, pengajian maupun ritual keagamaan pada momen-momen khusus. Keberagaman fungsi masjid ini mencerminkan kompleksitas peran institusi keagamaan di masyarakat setempat. Sebagai contoh perbandingan, *Pawestren* di Masjid Babadan telah mengalami perubahan fungsi menjadi perpustakaan dan gudang, Peneliti melihat ini merupakan bentuk adaptasi peranan masjid dalam merespons

---

<sup>87</sup> Intan Mahardika Ikhsani, “Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Konsistensi Ruang Masjid Pathok Negara Ad-Darajat, Babadan, Bantul,” *Mintakat: Jurnal Arsitektur* 23, no. 2 (September 14, 2022): 75–76; Ismanto and Suparman, “Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial,” 75–76.

kebutuhan komunitas setempat.<sup>88</sup> Sementara itu, perbedaan pendekatan dapat ditemukan di Masjid Pathoknegaran lain, di mana *Pawestren* tetap berfungsi sebagai ruang ibadah bagi muslimah dengan tetap mempertahankan keberlanjutan tradisi keagamaan.

#### 4. Masjid Dongkelan

Masjid Dongkelan bertempat di Dsn. Dongkelan, Ds. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul. Masjid Dongkelan didirikan pada tahun 1775 M sebagai penghormatan Hamengkubuwono I atas Kyai Syihabuddin atas perannya selama pertikaian internal masa Mataram Islam antara Hamengkubuwono I dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa.<sup>89</sup>

Sama halnya dengan pengalaman Masjid Babadan, Masjid Dongkelan pernah dibakar karena menjadi sasaran perang pada saat Perang Diponegoro. Penyebab utamanya dibakarnya Masjid Dongkelan adalah fungsinya yang juga sebagai basis pertahanan yang ditopang dengan

---

<sup>88</sup> Walidah, Warga Muslimah, Wawancara interaktif, January 27, 2024.

<sup>89</sup> Setyowati et al., *Mengenal Lebih Jauh Masjid Islam Jawa*, 116–17.

beberapa pesantren yang tersebar di sekitar masjid. Masjid ini kemudian mengalami beberapa renovasi pasca Perang Diponegoro dan kepengurusannya diserahkan kepada warga setempat, yang kemudian dinamai dengan Masjid Nurul Huda.<sup>90</sup>

Untuk bagian *Pawestren* sendiri memiliki tinggi 3 - 4 m dengan konstruksi bangunan beratap kayu dan beralas lantai keramik kuning. *Pawestren* di Masjid Dongkelan kini difungsikan secara pasif, karena aktivitas ibadah untuk jamaah perempuan telah dipindahkan ke *liwan* dengan bentuk saf di belakang jamaah laki-laki, terpisah hanya dengan sekat papan kaca non-permanen. Aktivitas ibadah yang dimaksud adalah salat lima waktu, sedangkan untuk salat jumat, *pawestren* ditempati oleh jamaah laki-laki.<sup>91</sup>

Aktivitas publik meliputi pengajian, baik jamaah laki-laki dan perempuan, peringatan *Isra' Mi'raj*, *Nyadran*, dan rutin mingguan. Keterlibatan jamaah perempuan di Masjid Dongkelan diberdayakan dalam pengajian-pengajian mingguan

---

<sup>90</sup> Setyowati et al., 116–21.

<sup>91</sup> M. Burhanudin, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Wawancara interaktif.

yang dipimpin oleh pengajar (ustaz) setempat, dilaksanakan pada Selasa dan Kamis (malam hari) dengan tajuk “*Mar’atus Sholihah*” dan “*Khoirun Nisa*”.<sup>92</sup>

Melalui penelusuran di atas, Peneliti dapat melakukan kronologi dan ringkasan mengenai Masjid Pathoknegaran beserta *pawestren*-nya melalui tabel di bawah ini,

Nama Masjid Pathoknegaran	Tahun (M)	Dibangun Masa	<i>Pawestren</i>	Lokasi
Mlangi	1723	Hanengkuwuono I	Sebelah kanan masjid (aktif)	Dsn. Mlangi, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman.
Plosokuning	1724		Sebelah kiri dan kanan masjid (aktif)	Dsn. Plosokuning, Ds. Plosokuning, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.
Babadan	1774		Sebelah kiri masjid (non-aktif)	Dsn. Babadan, Ds. Gedhongkuning, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul.
Dongkelan	1775		Sebelah kiri dan kanan masjid (non-aktif)	Dsn. Dongkelan, Ds. Tirtornirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul.

---

<sup>92</sup> M. Burhanudin, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta; Siti Jumaiyah, Warga Muslimah, Wawancara interaktif, February 2, 2024.

**BAB III**

**DINAMIKA & KOMUNIKASI RUANG PUBLIK**

**MUSLIMAH JAWA DALAM *PAWESTREN***

**A. Diskursus Gender di Ruang Publik dan Privat**

Atensi terhadap dinamika gender di nusantara tidak bisa diabaikan. Pertama, diawali oleh Stivens bahwa segala bentuk pengabaian terhadap tindakan publik perempuan, fokusnya di Asia Tenggara, menjauhkan peluang perspektif feminisme timur untuk muncul dalam kancah akademis. Stivens menegaskan bahwa terdapat peran yang cukup dinamis dan aktif dari kelompok perempuan, baik dalam koridor politik maupun sosial-budaya.<sup>93</sup> Kedua, pengaruh barat dalam melihat kajian feminisme timur secara utuh juga problematis. Hal ini disebabkan adanya pemaksaan narasi yang dibangun di negara maju yang mana jelas berbeda dengan realitas kultur timur. Separasi konsep ruang publik dan privat dari barat yang sempit, membuat kajian gender di timur makin terlimitasi. Karena opini bahwa ruang privat merupakan satu-satunya alasan supresi bagi perempuan begitu dilematis. Stivens kembali menyoroti problem ini dengan memaparkan bagaimana kultur timur, seperti

---

<sup>93</sup> Stivens, "Why Gender Matters in Southeast Asian Politics," 9–10.

Malaysia dan Indonesia, yang sama sekali berbeda dengan kultur dan narasi yang dibangun di barat.<sup>94</sup>

Sebagai contoh kasus, sebut saja yang ditemukan Makmun dalam Yuli bahwa terdapat peran besar perempuan di Mlangi dalam keterlibatannya di ruang publik. Temuan ini menjadi indikasi penting bahwa terdapat varian tafsir *fiqh* yang berbeda, serta kultur pesantren yang selalu menempatkan perempuan di posisi privat. Di sana juga disebutkan bahwa peran perempuan dipengaruhi oleh beberapa aspek, misalnya sosial, politik, budaya dan ekonomi.<sup>95</sup>

Sebut saja peranan istri seorang kyai di pesantren-pesantren Mlangi yang memiliki otoritas manajemen di pesantrennya. Pada dasarnya kultur kelembagaan dalam sebuah pesantren umumnya dipegang oleh sosok kyai, namun kultur pesantren tersebut sama sekali tidak menghambat prinsip kesetaraan di Mlangi. Hal ini dibuktikan dengan peran vital istri kyai yang menjalankan aktivitas ekonomi dan operasional pesantren, yang mana proporsi peranan tersebut hampir setara

---

<sup>94</sup> "...the idea that the location of women in such a sphere precludes their full political participation is highly problematic: it assumes a narrow definition of politics as something that only happens in the 'public' sphere", Stivens, 15.

<sup>95</sup> Nensi Golda Yuli, "The Spatial Concept at Moslem Settlements in Current Context of Modern Indonesia Using Phenomenology Method. Case Study: Pathok Negoro Area in Yogyakarta, Indonesia" (PhD Thesis, Dissertation, Weimar, Bauhaus-Universität Weimar, 2016, 2017), 28

dengan sosok kyai. Realitas tersebut merepresentasikan bahwa ruang privat (seperti rumah) tidak selalu identik dengan “ruang marginalisasi” bagi perempuan, namun bisa dijadikan ruang untuk bekerja dan mengelola berbagai urusan komunal. Keterlibatan perempuan sepenuhnya mematahkan dominasi laki-laki yang selalu memegang kuasa, meskipun memang karakteristik keluarga tradisional menempatkan mereka di posisi kedua.<sup>96</sup>

Contoh patron lain yang juga berlatar di Yogyakarta menunjukkan dinamika perempuan di ruang publik. Eksistensi *Korps Prajurit Estri* selama pemerintahan Hamengkubuwono I hingga Hamengkubuwono II merupakan fenomena yang patut mendapat atensi khusus.<sup>97</sup> Keputusan istana untuk membentuk *Korps Prajurit Estri*, sebuah unit militer yang terdiri dari perempuan, untuk menjalankan peran dalam ekonomi dan ketahanan politik cukup signifikan. Penunjukan korps ini mengindikasikan bahwa kedudukan perempuan memiliki peran penting, terutama dalam proteksi keamanan keluarga istana dan mendukung perekonomian warga (bidang pertanian dan perkebunan) di bawah naungan istana. Pentingnya peran tersebut tercermin dalam hak prerogatif istana untuk membentuk unit

---

<sup>96</sup> Yuli, 64–65.

<sup>97</sup> Ann Kumar, “Geisha Warriors? The Incomparable Prajurit Estri at the Court of Mangkunegara I,” in *Women Warriors in Southeast Asia* (Routledge, 2020).

militer perempuan, yang menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa diabaikan dalam konteks keamanan dan ekonomi istana. Menariknya, justifikasi atas tindakan subordinasi perempuan, yang seringkali disandarkan pada kultur doktrinasi Jawa – Islam, tidak begitu nyata pada kasus ini. Keterlibatan perempuan dalam *Korps Prajurit Estri* dipandang sebagai langkah positif yang dilegitimasi oleh otoritas istana. Sebaliknya, otoritas istana justru menempatkan perempuan dalam posisi yang memungkinkan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam kancah publik.<sup>98</sup>

## **B. Dinamika *Pawestren* sebagai Ruang Publik bagi Perempuan**

Berangkat dari pemisahan antara ruang publik dan privat dalam diskursus gender, *pawestren* menjadi topik lokal yang representatif dalam mendiskusikan posisi perempuan di ruang publik. Signifikansi *pawestren* sebagai ruang ibadah khusus bagi perempuan, khususnya di Masjid Pathoknegaran, tidak dapat dipisahkan dari jejak percontohan awal yang menginisiasinya, yaitu Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, dan mencapai titik muara di Masjid Agung Demak.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Salebaran Salebaran and Mutiah Amini, “Women, Military, and State: Indonesian Women’s Military Representation During the Early Independence Period,” *International Journal of Military History and Historiography* 1, no. aop (November 11, 2022): 25–26, Yuliarni Yuliarni et al., “Peranan Prajurit Perempuan (Korps Prajurit Estri) Terhadap Perkembangan Ekonomi Dan Militer Di Yogyakarta 1750-1810,” *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah* 3, no. 1 (2020): 2–9

<sup>99</sup> Adrisijanti, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*, 15.

Sebagai contoh, *pawestren* yang terdapat di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, seperti yang diuraikan oleh Aryanti, menjadi hasil dari otoritas keraton yang menerapkan langkah-langkah protektif terhadap perempuan dan laki-laki yang bukan *mahram*. Menariknya, *pawestren* tidak hanya dipandang sebagai ruang ibadah semata, tetapi juga diartikan memiliki implikasi konseptual yang sejalan dengan ruang spasial di dalam keraton. Ruang spasial tersebut lahir dari kuasa otoritas sultan terhadap pemisahan jenis kelamin, di mana terdapat *kasatriyan* (ruang untuk laki-laki), *keputren* (ruang untuk perempuan) yang berada di *kedhaton* (halaman istana) dengan *bangsal kencana* (kursi duduk sultan) di bagian tengah.<sup>100</sup> Fungsi ini dianggap sebagai mekanisme pemisahan antara laki-laki dan perempuan dari keluarga keraton, mengekspresikan kebijakan proteksi dan keamanan yang diadopsi oleh otoritas keraton terhadap kedua jenis kelamin.<sup>101</sup>

Dalam orbit kajian ini, kehadiran *pawestren* sebagai tempat ibadah yang memisahkan antara jamaah laki-laki dan perempuan mengundang dua perspektif yang cukup kontras. Melacak jejak sejarah awal eksistensinya, *pertama*, Reda memperinci polemik seputar segregasi gender di masjid. Reda menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam

---

<sup>100</sup> Aryanti, "Breaking the Wall, Preserving the Barrier," 167.

<sup>101</sup> Aryanti, "Women's Prayer Space," 6.

keputusan mengenai pemisahan tempat ibadah bagi jamaah laki-laki dan perempuan. Corak pemisahan gender, yang termanifestasikan secara material melalui pengadaan *maqsurah* di masjid, baru muncul pada masa pemerintahan Khalifah ‘Umar bin Khattab, sementara tidak ada bukti atau tradisi pemisahan sebelumnya.<sup>102</sup> *Kedua*, dalam sumber lain yang disebutkan Rosyid dan Kushidayati, bahwa segregasi ruang bagi perempuan di masjid mulai eksis pada kekaisaran Turki Utsmani. Bentuk material pada masa ini ditunjukkan pada masjid-masjid yang menempatkan ruang khusus bagi perempuan, baik di atas balkon maupun sisi samping dari posisi jamaah laki-laki.<sup>103</sup>

Fenomena ini menciptakan rentang interpretasi yang beragam, terutama terkait apakah tindakan tersebut merupakan refleksi rekognisi terhadap perempuan ataukah sekadar bentuk pelestarian segregasi. Perspektif yang variatif ini muncul dalam menanggapi implementasi pemisahan gender. Beberapa melihatnya sebagai bentuk pengakuan dan rekognisi terhadap peran perempuan dalam ruang ibadah, sementara yang lain menilainya sebagai bentuk pelestarian norma segregatif.

---

<sup>102</sup> Nevin Reda, “Women in the Mosque: Historical Perspectives on Segregation,” *American Journal of Islam and Society* 21, no. 2 (2004): 86–94.

<sup>103</sup> Moh Rosyid and Lina Kushidayati, “A Gender Inequality in Mosque,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2023): 80–81.

Dalam wacana kontemporer, Pijper menganggap *pawestren* sebagai produk esensial dari tipologi masjid di Jawa, dan apresiasinya terhadap warisan ini didasarkan pada pandangannya bahwa *pawestren* membuka akses bagi muslimah untuk aktif tampil di ruang publik.<sup>104</sup> Meski demikian, pandangan ini dihadapi dengan penilaian kritis dari Felisiani dan Aryanti, yang menyatakan bahwa terdapat ketimpangan gender yang mencerminkan budaya patriarki Jawa yang cenderung mendiskriminasi perempuan. Argumentasi ini berkuat pada perbedaan elemen fisik arsitektural antara ruang utama masjid untuk laki-laki (*liwan*). Mereka menyoroti keluasan yang lebih terbatas, lokasi *pawestren* yang terletak di samping masjid, dan posisi lantai *pawestren* yang lebih rendah dibandingkan ruang utama. Eksklusivitas ini, menurut mereka, menciptakan situasi di mana perempuan menjadi kurang “terlihat” di ruang publik, memberikan kesan bahwa mereka diabaikan atau dikesampingkan.<sup>105</sup>

Penggalian informasi Peneliti dengan budayawan yang fokus terhadap konteks Matraman, Yaser Arafat, seakan bertolak

---

<sup>104</sup> Pijper, *Fragmento Islamica, Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam Di Indonesia Awal Abad XX*, Terj. Tadjimah, 4–5.

<sup>105</sup> Thanti Felisiani, “Pawestren pada Masjid-Masjid Agung Kuno di Jawa: Pemaknaan Ruang Perempuan” (Depok, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia, 2009), 64; Aryanti, “Women’s Prayer Space,” 7–8; Aryanti, “Breaking the Wall, Preserving the Barrier,” 190.

belakang dengan perspektif Felistiani dan Aryanti. Menurut Arafat, alokasi *pawestren* di samping bukanlah bentuk subordinasi, karena status *pawestren* sendiri dianggap sebagai ruang yang memiliki nilai sakral sejajar dengan *liwan*, sebagaimana keselarasan dengan pendapat yang lain.<sup>106</sup> Pembatasan aktivitas di *pawestren* sesuai dengan fungsinya sebagai ruang ibadah justru memperkuat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pemanfaatan *pawestren* sebagai ruang eksklusif untuk ibadah, *tawajjuh* dan *taqarrub*, tanpa digunakan untuk berbagai aktivitas selain itu, menjadikan statusnya setara dengan *liwan*. Pemahaman ini mengindikasikan bahwa memberikan akses kepada perempuan di *pawestren* sejatinya bukanlah cerminan marginalisasi, melainkan sebuah bentuk kesetaraan di dalam masjid.<sup>107</sup>

Salah satu bukti bahwa *pawestren* menjadi portal sosial untuk membuka akses kelompok perempuan di ruang publik dijelaskan melalui *Serat Rangsang Tuban* dalam laporan Syamsurijal. Otoritas tokoh masyarakat di abad ke-15, dalam hal ini seorang kyai (Kyai Agung Wulusan), mengalokasikan

---

<sup>106</sup> Yaser Arafat, Budayawan Jawa Matraman, Wawancara interaktif; Ramadhana and Dharoko, "Ruang Sakral Dan Profan Dalam Arsitektur Masjid Agung Demak, Jawa Tengah," 24; Huldiansyah and Subroto, "Konsistensi Ruang Pangimaman, Liwan, Dan Pawestren Di Masjid Pathok Negara Ad-Darojat Babadan, Bantul, Yogyakarta (1970-2019)," 182.

<sup>107</sup> Yaser Arafat, Budayawan Jawa Matraman, Wawancara interaktif.

ruangan dalam masjid untuk khusus digunakan kalangan perempuan. Di sana juga dijelaskan bahwa fungsi *pawestren* tidak hanya menjadi tempat salat, melainkan juga sebuah pondok untuk santri putri mendalami agama.<sup>108</sup>

Bukti historis lainnya juga dipaparkan Rosyid dan Kushidayati dalam menyorot kasus di Masjid Baiturrahman Kudus. Mereka melihat adanya pelarangan (sejak tahun 1923 M) terhadap perempuan untuk aktif di ruang publik (baik untuk kegiatan ibadah maupun sosial) karena beberapa faktor. Penyebabnya seperti (1) dapat menimbulkan fitnah, (2) putusan pemegang otoritas kemasyarakatan (kyai yang konservatif) yang menempatkan masjid hanya diperuntukkan bagi laki-laki, dan (3) interpretasi teks bahwa perempuan lebih baik melaksanakan ibadah di rumah. Pada akhirnya, seorang kyai (berparadigma baru) membawa solusi untuk membangun *pawestren* (pada renovasi pertama tahun 1969 M), yang kemudian membawa nafas untuk kelompok perempuan agar dapat berpartisipasi di masjid.<sup>109</sup>

Gelagat positif juga tampak pada lingkungan di sekitar Masjid Pathoknegeran Plosokuning, yang mana *pawestren*

---

<sup>108</sup> Syamsurijal Syamsurijal, "Menuju Feminisme Nusantara: Menata Ulang Gerakan Perempuan Di Indonesia," *MIMIKRI* 8, no. 1 (2022): 32.

<sup>109</sup> Rosyid and Kushidayati, "A Gender Inequality in Mosque," 85.

menjadi wadah bagi jamaah perempuan di kawasan tersebut. Asumsi Pijper bahwa terdapat potensi gesekan sosial (antara kelompok laki-laki dan perempuan) ketika perempuan tampil di ruang publik, nyatanya tidak terjadi di kawasan Masjid Plosokuning.<sup>110</sup>

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, *pertama*, karena doktrinasi bahwa perempuan selalu berada di ranah domestik tidak subur di Plosokuning. Peran jamaah perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik (masjid) tidak terhalang oleh pandangan bahwa perempuan lebih afdal di rumah. Hal ini juga diperkuat dengan pemberdayaan jamaah perempuan melalui pengajian khusus dan aktivitas-aktivitas kolektif di masjid.<sup>111</sup> *Kedua* mengenai *pawestren*, bahwasanya perempuan tetap menempati *pawestren* sebagai ruang eksklusif mereka, khususnya ketika salat lima waktu. Peneliti menemukan bahwa kebiasaan ini masih berlaku karena dinilai tidak ada pelanggaran dalam ketentuan agama (*fiqh*), serta bentuk merawat warisan lokal. Kultur yang masih berjalan ini juga didorong dan mendapatkan atensi dari Dinas Kebudayaan setempat dalam

---

<sup>110</sup> Pijper, *Fragmento Islamica, Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam Di Indonesia Awal Abad XX*, Terj. Tadjimah, 43.

<sup>111</sup> Kamaludin Purnomo, Takmir Masjid Plosokuning, Wawancara interaktif; Sumiati, Warga Muslimah, Wawancara interaktif.

rangka untuk mempertahankan karakter Masjid Pathoknegaran sebagai warisan budaya di lingkungan Kesultanan Yogyakarta.<sup>112</sup>

Lain halnya dengan respons ketimpangan yang tampak dalam *pawestren* di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta. Aryanti mengambil langkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa sekelompok perempuan dari luar kalangan keraton berinisiatif untuk menciptakan alternatif ruang ibadah yang baru bagi muslimah. Ketidakpuasan terhadap mekanisme *pawestren* yang masih dianggap meminggirkan peran kelompok muslimah dalam ranah publik tampak nyata melalui pendirian Musalla Aisyiah dan Musalla al-Rosyad, yang juga berlokasi di kawasan Kauman, Yogyakarta.<sup>113</sup> Tindakan ini tentu menyoroti spirit perempuan yang terus aktif dalam merespons ketimpangan (berdasar atas perspektif mereka). Musalla Aisyiah dan Musalla al-Rosyad menjadi bentuk konkret dari upaya untuk memberikan ruang yang inklusif bagi muslimah di tengah dinamika *pawestren* yang masih menciptakan hambatan.

Dalam penelitian ini, upaya pendirian *pawestren* sebagai wadah yang diharapkan mampu mengakomodasi perempuan dinilai memiliki sejumlah problematika yang kompleks. Respons terhadap inisiatif ini tidak hanya kurang holistik, namun juga

---

<sup>112</sup> Kamaludin Purnomo, Takmir Masjid Plosokuning, Wawancara interaktif.

<sup>113</sup> Aryanti, "Women's Prayer Space," 8–10.

dianggap sebagai bentuk marginalisasi baru. Perspektif yang berbeda dalam memaknai *pawestren* diungkapkan oleh Dijk sebagai kontestasi dengan dua perspektif yang sama-sama menarik. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah *pawestren* harus diartikan sebagai sebagai hasil dari proses kognitif-progresif yang melibatkan perempuan secara lebih substansial dalam praktik keagamaan berskala publik, atau sebagai bentuk segregasi yang kaku dengan dalih-dalih agama?<sup>114</sup>

Melalui perspektif pertama, *pawestren* dimaknai sebagai hasil evolusi kognitif-progresif yang mengajak perempuan untuk lebih terlibat dalam rutinitas keagamaan yang bersifat publik. Sedang dalam perspektif kedua, *pawestren* dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memelihara segregasi gender dengan pelbagai doktrinasi agama dan kultur lokal, menciptakan ruang terpisah yang mengisyaratkan posisi sekunder bagi perempuan. Kontestasi antara dua sudut pandang ini mencerminkan kompleksitas diskursus mengenai peran perempuan dalam ruang keagamaan, yang juga menggambarkan perdebatan mendalam tentang sejauh mana ruang tersebut dapat

---

<sup>114</sup> C. Van Dijk, "Perubahan Kontur Masjid," in *Masa Lalu Dalam Masa Kini, Arsitektur Di Indonesia*, Peter J.M. Nas (Editor) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 72.

mencerminkan nilai-nilai inklusif dan kesetaraan dalam konteks agama.

Penghapusan batas fisik yang ada sebenarnya tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena muncul potensi adanya respons baru terhadap perubahan ini. Misalnya pada kasus Masjid Gedhe Kauman, Masjid Dongkelan dan Masjid Babadan, kini *pawestren* hanya difungsikan saat acara-acara seremonial keagamaan. Seperti digunakan saat perayaan *Grebeg* Maulid atau pengajian. Pelaksanaan salat lima waktu secara berjamaah kini dilakukan di *liwan* dengan barisan muslimah yang berada di belakang jamaah laki-laki, ini pun juga dilatarbelakangi oleh fatwa afiliasi setempat.<sup>115</sup> Perubahan regulasi atas saf perempuan di belakang saf laki-laki sebenarnya tidak begitu saja menanggalkan jawaban final, seperti bagaimana proteksi privat para muslimah saat salat, khususnya ketika terdesak kebutuhan untuk membuka aurat mereka (mis. melepas jilbab)?; di mana ruang khusus bagi perempuan jika sama-sama ditempatkan di ruang umum?

---

<sup>115</sup> Afiliasi kelompok tertentu juga berperan dalam penentuan kebijakan dalam masjid. Sebagaimana tampak berbeda antara Masjid Gedhe Kauman dengan Masjid Pathoknegaran (kecuali Masjid Pathoknegara Babadan dan Masjid Dongkelan) yang masih memelihara habit saf perempuan di samping (*pawestren*), M. Burhanudin, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Wawancara interaktif; Yaser Arafat, Budayawan Jawa Matraman, Wawancara interaktif.

Lain halnya yang tampak di Masjid Pathoknegara, khususnya Masjid Plosokuning, yang menilai bahwa tidak perlu ada regulasi baru mengenai batas fisik, sebab hal ini tidak bertentangan dengan syariat agama. Adanya dorongan untuk merawat warisan lokal (berupa *pawestren*) dengan menempatkan perempuan di tempat eksklusifnya juga memperkuat argumentasi tersebut. Di samping itu, eksistensi jamaah perempuan untuk terlibat di ranah sosial juga diperhatikan, sehingga tidak ada gesekan yang terjadi di sana.<sup>116</sup>

Aryanti dan Batul mengidentifikasi problematika ini berasal dari peran sosial dan politik di dalam masjid, di mana, meskipun perempuan diberikan akses fisik di ruang publik melalui *pawestren*, namun keterlibatan mereka diabaikan secara sosial.<sup>117</sup> Peneliti melihat bahwa *pawestren* tidak dapat dianggap sebagai solusi yang final untuk mengakui eksistensi perempuan di ruang publik. Isyarat ini juga menggarisbawahi bahwa kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam ranah sosial dan politik sebagai langkah penting. Hal ini memperlihatkan bahwa korelasi antara ruang fisik dan ruang politik sangat kentara.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Kamaludin Purnomo, Takmir Masjid Plosokuning, Wawancara interaktif.

<sup>117</sup> Aryanti, "Women's Prayer Space," 12.

<sup>118</sup> Zohra Batul, "Gender Politics and Public Sphere," *Economic & Political Weekly* 56, no. 16 (2021): 58.

Dalam hal ini, Peneliti selaras dengan Mazumdar yang menyuguhkan konsepsi untuk melakukan re-definisi ruang publik dan privat dalam diskursus Islam. Konsepsi ini nantinya akan diharapkan mampu meredam tensi ruang publik yang selalu dianggap oposisi terhadap ruang privat. Ini pun juga akan memberikan posisi yang jelas seorang muslimah dalam hal kedudukannya.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Shampa Mazumdar and Sanjoy Mazumdar, "Rethinking Public and Private Space: Religion and Women in Muslim Society," *Journal of Architectural and Planning Research*, 2001, 324; Shampa Mazumdar and Sanjoy Mazumdar, "In Mosques and Shrines: Women's Agency in Public Sacred Space," *Journal of Ritual Studies* 16, no. 2 (2002): 165.

## BAB IV

### ANALISIS TEMUAN DALAM PERSPEKTIF TEORI KOMUNIKASI RUANG PUBLIK & TEORI *STANDPOINT*

#### A. Teori Ruang Publik dalam Perspektif Habermas

Dalam interpretasi Habermas, ruang publik (*public sphere*) dapat diartikan sebagai sebuah konteks di mana semua lapisan masyarakat dapat hidup secara ideal dan proporsional. Pemaknaan ini membawa konsep ruang publik ke dimensi yang lebih luas, di mana independensi dalam skala publik menjadi perwujudan nyata. Dalam konteks tersebut, hak untuk berbicara, berserikat, dan berpartisipasi di ruang publik dianggap sebagai nilai yang sangat dihargai.<sup>120</sup> Habermas melihat konsep ruang publik menciptakan panggung yang adil dan setara bagi semua elemen. Independensi berskala publik membuka pintu bagi partisipasi aktif dari individu-individu dalam membentuk opini, mengemukakan pandangan, dan berkolaborasi dalam proses kolektif yang melibatkan kepentingan bersama. Berdasar uraian tersebut, ruang publik menjadi ruang yang inklusif dan demokratis, serta membawa dimensi etis-demokratis yang fundamental dan berkeadilan.<sup>121</sup>

Peletakan gagasan ruang publik didasarkan pada polemik kelas borjuis dan kelompok marginal, di mana distorsinya

---

<sup>120</sup> Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*:

<sup>121</sup> Habermas, 27.

diamati oleh Habermas pada abad ke-18. Habermas menyorot adanya dekadensi ruang publik yang tengah digerogeti oleh dominasi dan komersialisasi oleh kelas borjuis terhadap kelompok di bawahnya dalam struktur sosial. Dengan berkembangnya kapitalisme dan kelas borjuis yang semakin dominan saat itu, ruang publik cenderung menjadi panggung yang terkooptasi oleh kepentingan bisnis dan komersial, bukan lagi peluang otonom yang dimiliki oleh semua orang.

Lebih lanjut, ikhtisar konsepsi yang disuguhkan Habermas ini terletak pada beberapa prinsip fundamental.<sup>122</sup> **Pertama**, konsep ini menegaskan prinsip kesetaraan hak, di mana setiap individu memiliki hak yang sama tanpa ada tindakan diskriminatif di dalamnya. Kesetaraan ini dianggap sebagai dasar yang esensial untuk menciptakan ruang publik yang inklusif dan demokratis. **Kedua**, Habermas juga menekankan prinsip egalitarianisme dalam merealisasikan kepentingan kolektif. Egalitarianisme mampu menciptakan landasan untuk partisipasi aktif semua golongan dalam proses pembentukan persepsi publik, tanpa adanya dominasi atau kontrol yang merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, ruang publik diharapkan menjadi wadah yang mewakili beragam paradigma dan kepentingan. **Ketiga**, Habermas menyoroti mekanisme yang melindungi kepentingan semua golongan. Artinya, ruang publik

---

<sup>122</sup> Habermas, 36–37.

yang ideal harus dilengkapi dengan struktur dan aturan yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok. Hal ini menciptakan payung hukum yang memberikan jaminan bahwa setiap opini dihargai dan diakui, menjadikan ruang publik sebagai tempat di mana dialog dan pertukaran ide dapat terjadi secara seimbang dan berkeadilan.<sup>123</sup>

Dalam orbit kajian *pawestren* ini, pergulatan antara ruang publik dan ruang privat menjadi sangat kentara. Polemik berkulat pada isu *pawestren*, apakah menjadi akses terbukanya peluang bagi perempuan untuk tampil di ruang publik, atau menjadi belenggu perempuan yang masih di bawah laki-laki? Berdasarkan fakta penelitian dalam Masjid Pathoknegaran, bahwa *pawestren* menjadi salah satu manifestasi perempuan yang diberdayakan di ruang publik masyarakat. Tak hanya pada urusan peribadatan, namun presensi perempuan untuk berserikat dan diakui secara struktural di Masjid Pathoknegaran, menjadikan *pawestren* sebuah representasi yang tidak membenturkan perempuan dan ruang publik.

Dua konteks tersebut sering kali menjadi prahara yang selalu lestari, khususnya pada kultur etnik Jawa yang seakan mustahil diubah. Dalam kultur Jawa, perempuan cenderung selalu menduduki posisi yang lebih inferior dibandingkan laki-

---

<sup>123</sup> Habermas, *Between Facts and Norms*, 359–60.

laki, dan sering kali terbatas pada peran privat yang stereotip.<sup>124</sup> Namun seiring waktu, stereotip ini mulai mengalami transisi yang mengarah pada ekualitas dalam konteks perempuan di ruang publik. Transisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial, perubahan peran sosial perempuan, norma dan nilai yang berkembang, serta meningkatnya kesadaran dan kualitas kognitif masyarakat. Hal ini dapat dilihat sebagaimana fakta penelitian yang disebutkan sebelumnya di lingkungan Masjid Pathoknegaran.<sup>125</sup>

Menyambung konsepsi Habermas, Peneliti coba merujuk pada Putra dan Yulindrasari yang merumuskan karakteristik ruang publik secara praktis dan fisik. Menurutnya, definisi ruang publik memiliki karakteristik yang (1) mampu mewedahi dinamika sosial masyarakat, (2) memiliki akses yang terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa sebuah pengecualian, (3) bersifat universal dan inklusif, (4) serta bersifat publik yang tidak memiliki sekat pembatas di dalamnya.<sup>126</sup> Namun, Peneliti melihat bahwa karakteristik ini masih bersifat global, yang mana

---

<sup>124</sup> Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (Princeton University Press, 1999).

<sup>125</sup> Atik Catur Budiati, "Aktualisasi Diri Perempuan Dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan Terhadap Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Mengaktualisasikan Diri)," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 3, no. 1 (2010): 52–54.

<sup>126</sup> Bagas Dwipantara Putra and Hani Yulindrasari, "Peran Organisasi Perempuan Dalam Ruang Perkotaan," *Jurnal Penataan Ruang* 18, no. 1 (2023): 8.

tipologi turunan di lapangan kadang menampilkan kenyataan yang tidak demikian. Utamanya pada poin keempat, apabila sifat *publicness* tanpa adanya sekat, apakah juga representatif jika direalisasikan dalam masjid sebagai ruang publik? Ini tentu mengabaikan konteks sosial yang hidup di suatu wilayah tersebut.

Dalam penelusuran Hantono, bukti konektivitas pada bangunan fisik antara aspek sosial dan budaya dalam penataan ruang publik tak dapat dipisahkan, khususnya dalam bidang keilmuan arsitektur. Menilik penelusurannya pada beberapa literatur, termasuk milik Al-Bishawi, Hantono menyebutkan bahwa penataan ruang publik tidak terlepas dari analisis perilaku sosial lokal setempat. Ia mencontohkan laporan etnografis yang diangkat Al-Bishawi bahwa penataan ruang publik di Nablus – Palestina, sangat berkaitan dengan nilai-nilai khusus bagi perempuan seperti privasi, keamanan dan kenyamanan, hal ini pun juga didasarkannya pada teori aspek perilaku di ruang publik milik Windley & Scheidt.<sup>127</sup>

Simpulannya, Hantono mencoba menggariskan bahwa kultur lokal yang berlaku di sebuah wilayah sangat

---

<sup>127</sup> Dedi Hantono, “Kajian Perilaku Pada Ruang Terbuka Publik,” *NALARs* 18, no. 1 (2019): 48–51; Manal Al-Bishawi, Shadi Ghadban, and Karsten Jørgensen, “Women’s Behaviour in Public Spaces and the Influence of Privacy as a Cultural Value: The Case of Nablus, Palestine,” *Urban Studies* 54, no. 7 (May 2017): 1575–76.

mempengaruhi bagaimana manifestasi penataan ruang publik yang dibangun. Sudah tentu tak dapat dipukul rata antara wilayah dengan kultur Islam yang minor, dengan wilayah dengan kultur Islam yang lebih mayor (dominan).<sup>128</sup> Peneliti melihat bahwa visualisasi *pawestren*, khususnya di Masjid Pathoknegaran, adalah wujud dari interaksi antara kultur sosial-budaya, regulasi agama, serta kognisi komunitas setempat.

Akses keterbukaan di ruang publik ini (*pawestren*) juga tidak termanifestasi melalui bentuk fisik, melainkan juga peran dan kedudukan sosial perempuan. Penulis mencoba membandingkan penelusuran Antoun dan Khodafi yang menelisik dinamika pemegang otoritas agama dari kalangan perempuan, masing-masing berlatar di Yordania dan Indonesia. Antoun menjelaskan bahwa perempuan tidak mendapatkan kepercayaan untuk menjadi poros publik dan pemegang otoritas agama, disebabkan oleh kultur yang terlalu kuat didominasi oleh laki-laki.<sup>129</sup> Beda halnya dengan Khodafi, khususnya pada masyarakat tradisional di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), pengajar perempuan (*Nyai*) yang memiliki intelektualitas, prestasi dan kepercayaan diri tinggi, mampu untuk memegang otoritas keagamaan sekaligus tampil di ruang publik. Khodafi

---

<sup>128</sup> Hantono, "Kajian Perilaku Pada Ruang Terbuka Publik," 56.

<sup>129</sup> Richard T. Antoun, *Muslim Preacher in the Modern World: A Jordanian Case Study in Comparative Perspective* (Princeton University Press, 2014), 35–45.

menunjukkan *majlis ta'lim* di berbagai masjid yang dipimpin oleh perempuan menjadi tolok ukur yang presisi untuk menilai seberapa besar pengaruh perempuan di kancah publik.<sup>130</sup> Fakta yang demikian juga sebelumnya telah diungkap Peneliti bahwa peran *Nyai*, khususnya di lingkungan Masjid Pathoknegaran Mlangi, mematahkan privatisasi perempuan yang sangat stereotip.

Melalui bukti, baik dalam perspektif teknik arsitektur (fisik) dan perspektif sosial, menunjukkan bahwa perempuan di lingkungan Masjid Pathoknegaran diwadahi dengan baik. Kelompok perempuan tidak hanya hadir sebagai pihak yang menyimbolkan persamaan hak di ruang publik, namun juga menyalurkan peranan terhadap pengembangan kemasyarakatan. *Pawestren* menjadi bukti representatif bahwa pengakuan keberadaan perempuan sangat diperhatikan dengan dialokasikannya ruangan khusus yang mewadahi kebutuhan mereka.

## **B. Teori *Standpoint* dalam Perspektif Sandra Harding**

Harding menyajikan sandaran perspektif *Standpoint* yang menitikberatkan pada perspektif kemasyarakatan dengan orientasi pada kesetaraan atas segala aspek sosial, termasuk

---

<sup>130</sup> Muhammad Khodafi et al., *Dinamika Otoritas Ulama Perempuan Indonesia Di Ruang Publik (Kebangkitan Nyai Dalam Komunitas Muslim Tradisional Nahdlatul Ulama)* (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 73–77.

gender, suku, ras etnis maupun agama. Dalam konteks diskursus gender dan feminisme, *Standpoint* menekankan pentingnya mengalihkan pusat pandangan kepada kelompok-kelompok yang berada dalam posisi inferior dalam struktur sosial. Pendekatan ini memungkinkan Peneliti untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi yang unik dalam pengalaman suatu kelompok.<sup>131</sup>

Lebih lanjut, pendekatan *Standpoint* dalam studi komunikasi muncul dalam rangka merespons dinamika ketimpangan yang terjadi antara kelompok dominan dan kelompok yang tidak dominan (marginal). Kerentanan terhadap kompleksitas dikotomi tersebut membuat *Standpoint* menjadi salah satu alat yang ideal dalam melihat realitas di kelas bawah masyarakat.<sup>132</sup>

Perumusan sebuah pertanyaan akademik maupun masalah sosial mesti ditinjau melalui kacamata mereka yang tersingkir dalam struktur sosial. Konsepsi *strong objectivity* oleh Harding dengan peletakan persepsi ini adalah upaya yang coba dikonstruksi dalam menjernihkan analisis terhadap sebuah problematika sehingga lebih objektif. Sebagaimana klaim Harding untuk menguatkan argumentasinya, bahwa kacamata dari kelompok marginal bukan berarti selalu memaksimalkan

---

<sup>131</sup> Harding, "Rethinking Standpoint Epistemology," 54–55.

<sup>132</sup> Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, and John G. Oetzel, *Theories of Human Communication: Eleventh Edition* (Waveland Press, 2016), 81.

objektivitas, namun tawaran perspektif ini perlu dipertimbangkan. Baginya, notula terpenting dalam sebuah penelitian, khususnya yang bernafaskan gender atau feminisme saintifik, adalah bukti dari mereka yang malah sering dianggap tidak penting. Hal ini pun juga menjadi piranti saintifik dalam menilai bagaimana relasi kekuasaan yang tengah eksis, serta mengajukan argumentasi mengenai sifat-sifat tirani yang meminggirkan kelompok inferior.<sup>133</sup>

Khususnya pada orbit kajian gender dan feminisme, Harding melihat bahwa kelompok perempuan kerap mengalami marginalisasi di lingkungan sosialnya, di bawah kendali dominasi kelompok laki-laki.<sup>134</sup> Sajian *Standpoint* mengungkap bagaimana struktur sosial yang dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih minor dan tidak diuntungkan, baik dalam akses terhadap sumber daya maupun dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Harding menggambarkan bagaimana sistem nilai yang didominasi oleh pandangan

---

<sup>133</sup> Sandra Harding, *Objectivity and Diversity: Another Logic of Scientific Research* (University of Chicago Press, 2015), 34; Layla J. Huber, "Assessing Aspects of Feminist Standpoint Theory," *Layla J. Huber Assessing Aspects of Feminist Standpoint Theory Shirin Salah Eddine Die Rolle Des Zivilen Ungehorsams Gemäss Rawls in Der Klimakrise*, n.d., 7–8.

<sup>134</sup> Harding, "Rethinking Standpoint Epistemology," 50; Ratna Huiem, Kathiresan Loganathan, and Priyanka Patowari, "Feminist Standpoint Theory and Its Importance in Feminist Research," *Journal of Social Work Education and Practice* 5, no. 2 (2020): 50.

maskulin sering kali parsial, mengekang potensi dan aspirasi perempuan, mengakibatkan benturan kepentingan sosial yang melibatkan berbagai elemen.<sup>135</sup>

Pendekatan *Standpoint* pada diskursus ini diklaim memiliki keunggulan khusus berupa wawasan epistemik yang hanya dapat ditemui melalui sudut pandang kelompok marginal. Jika ditelisik, konsepsi milik Harding tersebut memiliki similaritas yang simultan dengan distingsi majikan dan budak dari Hegel, maupun proletar dan burjois dari Marx.<sup>136</sup>

Dengan menempatkan poros pandangan pada perspektif kelompok yang lebih terpinggirkan, *Standpoint* mengusulkan sebuah sudut pandang alternatif yang mampu memperkaya analisis sosial. Perspektif ini tidak hanya melihat kesetaraan sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan pemahaman dan pengalaman kontestasi dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam mengatasi supresi yang dialami. Produk dari penggunaan konsepsi *Standpoint* ini menyajikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diperhitungkan dalam data penelitian maupun putusan kolektif di sebuah masyarakat. Oleh karena itu, seorang peneliti yang

---

<sup>135</sup> Hirsh, Olson, and Harding, "Starting From Marginalized Lives," 224.

<sup>136</sup> Huber, "Assessing Aspects of Feminist Standpoint Theory," 6; Natasha S. Mauthner, *Feminist Methods* (SAGE Publications Limited, 2020), 4.

menggunakan pisau analisis ini selayaknya melakukan penyelaman secara mendalam di bawah permukaan, untuk menemukan perspektif lain yang terhambat eksistensinya.<sup>137</sup>

Peneliti mengamati bahwa kemunculan *pawestren*, secara umum, mencerminkan produk aktualisasi perspektif yang diusung oleh Harding. Berbagai fenomena awal menandai awal munculnya perubahan sosial yang dimulai dari upaya kelompok muslimah untuk membuka wacana mengenai posisi inferior mereka dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah diulas Peneliti di atas, *pawestren* (misal pada Masjid Gedhe Kauman) lahir atas inisiasi dalam mewadahi kelompok perempuan dari keluarga kerajaan untuk dapat melaksanakan ibadah di masjid. Sama halnya di Masjid Pathoknegaran yang awalnya memang digunakan untuk keluarga kerajaan, namun intensitas kunjungan keraton ke pelosok hanya temporal, maka kemudian diperuntukkan untuk warga umum sekitar.<sup>138</sup> Terlebih dengan fakta pembangunan *pawestren* yang banyak ditemui belakangan dari pembangunan masjid awal. Peneliti menggunakan tesis Pijper bahwasanya terdapat dinamika yang terjadi pada interval

---

<sup>137</sup> Alison Wylie and Sergio Sismondo, "Standpoint Theory, in Science," in *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second Edition)*, ed. James D. Wright (Elsevier, 2015), 1, <https://philarchive.org/rec/SISSTI>; Huiem, Loganathan, and Patowari, "Feminist Standpoint Theory and Its Importance in Feminist Research," 50–52.

<sup>138</sup> Husaein Eryzona, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Wawancara interaktif.

waktu tersebut, yang disebutkannya melalui beberapa bukti perlawanan hak perempuan di ruang publik.<sup>139</sup>

Selain itu, proporsi ruang perempuan secara eksklusif dapat dilihat melalui *pawestren*. Eksistensinya tidak hanya mewadahi perempuan beribadah, namun juga memudahkan dalam melakukan aktivitas-aktivitas privat seperti membuka aurat. Ini menjadi bukti bahwa *pawestren* tidak hanya sebagai ruang ibadah konvensional, namun sarat dengan pemenuhan aspek etika dan tata krama sosial. Pada aspek utilitas, *pawestren* tidak hanya difungsikan sebagai ruang ibadah konvensional, namun juga menjadi panggung dinamika kelompok muslimah. *Pawestren* terakselerasi menjadi tempat yang menopang pusat pengembangan perempuan (seperti pengajian dan musyawarah), yang tentunya menjadi bukti pengakuan kelompok mereka di ranah publik yang tidak lagi terpinggirkan.

Seperti yang dicontohkan oleh pendekatan Harding, *pawestren* terlihat menjadi wujud simbol pengakuan hak-hak perempuan di dalam ruang publik. Melalui *pawestren*, kelompok muslimah mengambil inisiatif kesetaraan dan mengatasi marginalisasi terhadap domestikasi posisi mereka. Hal ini mencerminkan agitasi sosial dalam mengajukan perspektif baru ke lapisan masyarakat untuk memberikan ruang beribadah bagi

---

<sup>139</sup> Pijper, *Fragmento Islamica, Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam Di Indonesia Awal Abad XX*, Terj. Tudjimah, 43.

mereka di ruang publik, yang sebelumnya terlalu kuat dengan kultur patriarkal, serta membuka jalan bagi inklusi dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian ini, Peneliti merumuskan ikhtisar akhir yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Masing-masing dari rumusan masalah yang dimaksud adalah, (1) Mengapa eksistensi *pawestren* signifikan dalam mewadahi peribadatan Muslimah Jawa?, dan (2) Bagaimana dialog Muslimah Jawa dalam memperoleh akses peribadatan publik yang setara?

**Pertama**, *pawestren* merupakan salah satu bagian dalam struktur masjid-masjid tradisional di Jawa yang diresevasikan secara khusus untuk kelompok perempuan. Dalam latar penelitian ini, yakni pada Masjid Pathoknegeran (lebih khusus *pawestren* yang masih difungsikan di Mlangi dan Plosokuning), *pawestren* memiliki fungsi untuk memfasilitasi kelompok perempuan dalam ranah syariat maupun sosial-publik. *Pawestren* menjadi tempat yang mewadahi perempuan untuk melaksanakan aktivitas peribadatan, serta urusan-urusan yang mengharuskan mereka untuk membuka aurat.

Di samping itu, *pawestren* juga menjadi kancah pengembangan sosial pada spektrum publik, bukan lagi kental dengan stereotip bahwa perempuan hanya di ruang privat. Wadah yang bersifat publik ini terwujud dalam berbagai bentuk, seperti musyawarah hingga pengajian. Manifestasi ruang publik (dalam

perspektif Habermas) yang memaparkan sebuah situasi di mana terciptanya panggung yang adil, setara, egaliter dan partisipatif bagi semua elemen, termasuk kalangan inferior di masyarakat, tercermin pada *pawestren*.

Peneliti berkesimpulan bahwa *pawestren* tidak hanya memenuhi kebutuhan beribadah, namun juga menjadi ruang bagi Bergeraknya dinamika sosial berskala publik bagi muslimah. *Pawestren* juga merupakan wujud dari interaksi antara kultur sosial-budaya, regulasi agama, serta kognisi komunitas setempat. Terlepas dari dinon-aktifkannya *pawestren* di Masjid Pathoknegara Dongkelan dan Babadan karena kebijakan lokal setempat, *pawestren* tetap menjadi bukti bahwa akses peribadatan di ruang publik bagi muslimah diakomodir dengan setara.

**Kedua**, manifestasi *pawestren* terwujud atas dialog dan dinamika kelompok perempuan yang sering mengalami subordinasi dalam hierarki sosial. Sebagaimana penjelasan Harding, dinamika yang digagas oleh kelompok perempuan merupakan respons ketimpangan yang terjadi antara kelompok dominan dan kelompok yang tidak dominan di masyarakat. Banyak bukti yang mencerminkan bahwa awalnya kelompok perempuan sering dianggap tidak penting, terlebih dengan sistem nilai yang didominasi oleh pandangan maskulin sering kali parsial, mengekang potensi dan aspirasi perempuan.

Berangkat dari realitas tersebut, banyak fenomena awal yang menandai permulaan munculnya perubahan sosial yang dimulai dari upaya kelompok muslimah untuk membuka wacana mengenai posisi inferior mereka dalam masyarakat. Sebagaimana pada konteks Masjid Pathoknegaran yang berporos pada Masjid Gedhe Kauman, yang lahir atas inisiasi dalam mewadahi kelompok perempuan dari keluarga kerajaan untuk dapat melaksanakan ibadah di masjid.

Banyak fakta lain yang juga menunjukkan pembangunan *pawestren* yang ditemui belakangan dari pembangunan masjid awal. Dengan memakai tesis Pijper, terdapat probabilitas dinamika yang terjadi pada interval waktu tersebut, yang disebutkannya melalui beberapa bukti perlawanan hak perempuan di ruang publik.

## **B. Implikasi dan Saran Penelitian**

Implikasi dan saran disusun atas pertimbangan data serta analisis saintifik atas apa yang telah peneliti temukan. Implikasi merujuk pada konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan oleh temuan dan hasil sebuah penelitian. Fungsi implikasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan, praktik, kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan saran berfungsi sebagai komponen yang dapat mendukung tujuan, arah serta manfaat dalam sebuah

penelitian, yakni berupa rekomendasi, panduan atau suguhan saintifik.

Implikasi serta saran penelitian ini mengarah pada rekomendasi atas pengembangan partisipasi sosial berskala publik yang melibatkan semua elemen, termasuk perempuan. Hal tersebut menyangkut kesadaran atas perubahan norma dan sikap yang mesti mewadahi inklusivitas dan keadilan sosial bersifat kolektif.

Di samping itu, implikasi penelitian ini juga signifikan dalam ranah akademik bagi para sarjana dan akademisi, di mana wacana feminisme Islam-Jawa menjadi diskursus yang belum tereksplorasi secara holistik. Kiblat perspektif feminisme barat yang selalu dipakai untuk menguliti fenomena kenusantaraan nyatanya tidak selalu berhasil akibat jurang disparitas dalam berbagai aspek. Melalui *pawestren* sebagai salah satu cerminan korelasi dimensi perempuan, Islam dan budaya, peneliti merekomendasikan untuk mengembangkan perspektif yang otonom untuk melihat fenomena saintifik-unik dalam kerangka kenusantaraan.

*Wallahu A'lam bi al-shawaab...*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningrum, Dewi, Wiwik Setyaningsih, and Avi Marlina. "Pola Tata Ruang Masjid Kerajaan Di Surakarta." *Senthong* 2, no. 2 (2019).
- Adrisijanti, Inajati. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Jendela, 2000.
- Aisyah, Siti, and Asril Asril. "Mesjid Wanita Di Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman (Kajian Sejarah Sosial)." *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 2 (2015): 213–26.
- Albiladiyah, Samrotul Ilmi. "Sekilas Tentang Pathok Nagara." *Jantra* 1, no. 1 (2006): 4–4.
- Al-Bishawi, Manal, Shadi Ghadban, and Karsten Jørgensen. "Women's Behaviour in Public Spaces and the Influence of Privacy as a Cultural Value: The Case of Nablus, Palestine." *Urban Studies* 54, no. 7 (May 2017): 1559–77. <https://doi.org/10.1177/0042098015620519>.
- Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-Ilmiyyah, 2009.
- Antoun, Richard T. *Muslim Preacher in the Modern World: A Jordanian Case Study in Comparative Perspective*. Princeton University Press, 2014.
- Armiwulan, Hesti. "Gender-Based Cyber Violence: A Challenge to Gender Equality in Indonesia." *International Journal of Cyber Criminology* 15, no. 2 (2021): 102–11.
- Aryanti, Tutin. "Breaking the Wall, Preserving the Barrier: Gender, Space, and Power in Contemporary Mosque Architecture in Yogyakarta, Indonesia." PhD Thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2013. <https://core.ac.uk/download/pdf/17355742.pdf>.
- . "Shame and Borders: The 'Aisiyah's Struggle for Muslim Women's Education in Indonesia." In *Gender, Religion and Education in a Chaotic Postmodern World*, edited by Zehavit Gross, Lynn Davies, and Al-Khansaa Diab, 83–92. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013. [https://doi.org/10.1007/978-94-007-5270-2\\_6](https://doi.org/10.1007/978-94-007-5270-2_6).

- . “The Center Vs. The Periphery in Central-Javanese Mosque Architecture.” *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)* 34, no. 2 (2006): 73–80.
- . “Women’s Prayer Space: Body and Boundary.” *The International Journal of the Constructed Environment* 2, no. 3 (2012): 177–90.
- At-Toyibi, Muhammad Nur Hakimuddin, and Dyah Titisari Widyastuti. “Karakter Arsitektur Masjid Jawa Pada Masjid Pathok Negoro.” *Jurnal Arsitektur Pendapa* 4, no. 2 (2021): 23–32.
- Batul, Zohra. “Gender Politics and Public Sphere.” *Economic & Political Weekly* 56, no. 16 (2021): 53.
- Budi, Bambang Setia. “A Study on the History and Development of the Javanese Mosque.” *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* 4, no. 1 (May 1, 2005): 1–8. <https://doi.org/10.3130/jaabe.4.1>.
- Budiati, Atik Catur. “Aktualisasi Diri Perempuan Dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan Terhadap Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Mengaktualisasikan Diri).” *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 3, no. 1 (2010): 51–59.
- Cholil, Mufidah. “Complexities in Dealing with Gender Inequality: Muslim Women and Mosque-Based Social Services in East Java Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (n.d.): 459–88.
- Cresswell, John W. *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. SAGE Publications, 2014.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020. <https://theses.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.
- Darusuprpta, dkk. *Etika Jawa Sebuah Analisis Filsafat Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. London: sage, 2011. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=AIRpMHgBYqIC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Handbook+of+Qualitative+Research+denzin&ots=kpIQvDfzfb&sig=tEBWaVEHO2LW7WaEulBnywTWpo>.

- Depari, C. D. A. "Pengaruh Islam Terhadap Rencana Kota Yogyakarta." *Konservasi Arsitektur Kota Yogyakarta*, 2013, 23–39.
- Dijk, C. Van. "Perubahan Kontur Masjid." In *Masa Lalu Dalam Masa Kini, Arsitektur Di Indonesia*, Peter J.M. Nas (Editor). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Djohan, Effendi. *Sejarah Masjid-Masjid Kuno Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama, 1999.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas Dan Eksistensi*. Suka Press Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2015.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fauziyah, Yayuk. "Menyingkap Kuasa Maskulinitas Di Balik Tabir Feminitas Wanita Jawa." *Ulumuna* 12, no. 1 (2008): 183–200.
- Felisiani, Thanti. "Pawestren pada Masjid-Masjid Agung Kuno di Jawa: Pemaknaan Ruang Perempuan." Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia, 2009.
- Gelderen, Robert Heine. *Konsepsi Tentang Negara Dan Kedudukan Raja Di Asia Tenggara*, (Terj. Deliar Noer). Jakarta: Rajawali, 1982.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. John Wiley & Sons, 2015.  
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4SK1CgAAQB AJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=Between+Facts+and+Norms:+Contributions+to+a+Discourse+Theory+of+Law+and+Democracy&ots=4yq8MeN1gv&sig=gpS1tw8Hya8McyCb3uQLcey83fo>
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT press, 1991.  
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=e799caakIWOC&oi=fnd&pg=PR11&dq=The+Structural+Transformation+of+the+Public+Sphere&ots=5RLHjYRYz2&sig=7-aOTzI4vypT8q5HTBUiiWguLTc>

- Hakim, Abdul. "Akulturasi Budaya Bangunan Masjid Tua Cirebon Studi Pada Masjid Kaliwulu, Plered." *Suhuf* 4, no. 2 (2011): 289-â.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasat al-Risalah, 2009.
- Hantono, Dedi. "Kajian Perilaku Pada Ruang Terbuka Publik." *NALARs* 18, no. 1 (2019): 45–56.
- Harding, Sandra. *Objectivity and Diversity: Another Logic of Scientific Research*. University of Chicago Press, 2015.
- . "Rethinking Standpoint Epistemology: What Is 'Strong Objectivity'?" In *Feminist Epistemologies*, 49–82. Routledge, 2013.  
<https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203760093-3&type=chapterpdf>.
- Hendriatmo, Anton Satyo. *Giyanti, 1755: Perang Perebutan Mahkota III dan Terbaginya Kerajaan Mataram Menjadi Surakarta dan Yogyakarta*. Tangerang: CS Books, 2006.
- Herdiansyah, Haris. "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial." Salemba Humanika, 2010.  
[https://slims.bakrie.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=752&keywords=](https://slims.bakrie.ac.id/index.php?p=show_detail&id=752&keywords=).
- Hermanto, Heri, and Atinia Hidayah. "Masjid Nabawi Sebagai Dasar Pembentukan Masjid Agung Kraton Surakarta." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 9, no. 1 (2022): 57–63.
- Hernawan, Wawan, Busro Busro, and Mudhofar Muffid. "Suluk Pesisiran Dalam Arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, Indonesia: Suluk Pesisiran in The Architecture of The Masjid Agung Sang Cipta Rasa of Cirebon-Indonesia." *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi* 10, no. 1 (2021): 29–44.
- Hirsh, Elizabeth, Gary A. Olson, and Sandra Harding. "Starting From Marginalized Lives: A Conversation with Sandra Harding." *JAC*, 1995, 193–225.
- Huber, Layla J. "Assessing Aspects of Feminist Standpoint Theory." *Layla J. Huber Assessing Aspects of Feminist Standpoint Theory*

- Shirin Salah Eddine Die Rolle Des Zivilen Ungehorsams Gemäss Rawls in Der Klimakrise*, n.d., 4.
- Huirem, Ratna, Kathiresan Loganathan, and Priyanka Patowari. “Feminist Standpoint Theory and Its Importance in Feminist Research.” *Journal of Social Work Education and Practice* 5, no. 2 (2020): 46–55.
- Huldiansyah, Denny, and Tarcicius Yoyok Wahyu Subroto. “Konsistensi Ruang Pangimaman, Liwan, Dan Pawestren Di Masjid Pathok Negara Ad-Darojat Babadan, Bantul, Yogyakarta (1970-2019).” *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur* 5, no. 2 (2020): 173–84.
- Husaein Eryzona, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta. Wawancara interaktif, February 6, 2024.
- Ikhsani, Intan Mahardika. “Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Konsistensi Ruang Masjid Pathok Negara Ad-Darojat, Babadan, Bantul.” *Mintakat: Jurnal Arsitektur* 23, no. 2 (September 14, 2022): 73–84. <https://doi.org/10.26905/jam.v23i2.7270>.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. “Pesantren Mlangi: Poros Spiritual Intelektual Islam Di Yogyakarta Abad XVIII–XIX M.” *Millah: Journal of Religious Studies*, 2020, 225–46.
- Ismanto, Ismanto, and Suparman Suparman. “Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial.” *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (2019): 67–88.
- Jane, Emma A. “Online Abuse and Harassment.” *The International Encyclopedia of Gender, Media, and Communication* 116 (2020). <https://www.academia.edu/download/82166810/9781119429128.pdf>.
- “Jogjacagar | Sistem Informasi Cagar Budaya.” Accessed December 15, 2023. <https://jogjacagar.jogjaprov.go.id/detail/691/masjid-pathok-negoro-mlangi>.
- Kamaludin Purnomo, Takmir Masjid Plosokuning. Wawancara interaktif, January 26, 2024.
- Kardam, Nüket. “The Emerging Global Gender Equality Regime from Neoliberal and Constructivist Perspectives in International Relations.” *International Feminist Journal of Politics* 6, no. 1 (January 2004): 85–109. <https://doi.org/10.1080/1461674032000165941>.

- Khodafi, Muhammad, Rizal Darwis, M. Khusna Amal, Dwi Setianingsih, and Imelda Wahyuni. *Dinamika Otoritas Ulama Perempuan Indonesia Di Ruang Publik (Kebangkitan Nyai Dalam Komunitas Muslim Tradisional Nahdlatul Ulama)*. Surabaya: Intiyaz, 2015.  
[https://www.researchgate.net/profile/Rizal-Darwis/publication/322695810\\_Islam\\_Indonesia\\_Pasca\\_Reformasi\\_Dinamika\\_Keagamaan\\_Pada\\_Ranah\\_Sosial\\_Politik\\_Budaya\\_Hukum\\_dan\\_Pendidikan/links/5a698156aca2728d0f5e4093/Islam-Indonesia-Pasca-Reformasi-Dinamika-Keagamaan-Pada-Ranah-Sosial-Politik-Budaya-Hukum-dan-Pendidikan.pdf#page=83](https://www.researchgate.net/profile/Rizal-Darwis/publication/322695810_Islam_Indonesia_Pasca_Reformasi_Dinamika_Keagamaan_Pada_Ranah_Sosial_Politik_Budaya_Hukum_dan_Pendidikan/links/5a698156aca2728d0f5e4093/Islam-Indonesia-Pasca-Reformasi-Dinamika-Keagamaan-Pada-Ranah-Sosial-Politik-Budaya-Hukum-dan-Pendidikan.pdf#page=83).
- Kumar, Ann. “Geisha Warriors? The Incomparable Prajurit Estri at the Court of Mangkunegara I.” In *Women Warriors in Southeast Asia*. Routledge, 2020.
- Littlejohn, Stephen W., Karen A. Foss, and John G. Oetzel. *Theories of Human Communication: Eleventh Edition*. Waveland Press, 2016.
- M. Burhanudin, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta. Wawancara interaktif, February 2, 2024.
- Mauthner, Natasha S. *Feminist Methods*. SAGE Publications Limited, 2020.  
[https://www.academia.edu/download/65549535/Mauthner\\_Feminist\\_Methods\\_2020\\_copy.pdf](https://www.academia.edu/download/65549535/Mauthner_Feminist_Methods_2020_copy.pdf).
- Mazumdar, Shampa, and Sanjoy Mazumdar. “In Mosques and Shrines: Women’s Agency in Public Sacred Space.” *Journal of Ritual Studies* 16, no. 2 (2002): 165–79.
- . “Rethinking Public and Private Space: Religion and Women in Muslim Society.” *Journal of Architectural and Planning Research*, 2001, 302–24.
- Meliana, Silvia, and Octaviana Sylvia Caroline. “A Review of the Role of Intangible Axis toward the Pathok Negoro’s Design Concept, Yogyakarta.” *Humaniora* 11, no. 3 (2020): 169–75.
- Mir-Hosseini, Ziba. *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*. Princeton University Press, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

- Mshweshwe, Linda. "Understanding Domestic Violence: Masculinity, Culture, Traditions." *Heliyon* 6, no. 10 (2020). [https://www.cell.com/helion/pdf/S2405-8440\(20\)32177-0.pdf](https://www.cell.com/helion/pdf/S2405-8440(20)32177-0.pdf).
- Murti, Desy Ayu Krisna, and Ahmad Sarwadi. "Pathok Negoro: The Islamic Settlements in Modern Society." In *EduARCHsia & Senvar 2019 International Conference (EduARCHsia 2019)*, 156–59. Atlantis Press, 2020. <https://www.atlantispress.com/proceedings/eduarchsia-19/125934654>.
- Nafisyah, Sharifah. "Masjid Pathok Negoro Sulthoni Sebagai Pusat Akulturasi Budaya (1976-2000)." *Risalah* 2, no. 8 (2016). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/risalah/article/view/1843>.
- Palupi, Cindy Aprilia. "Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta Dalam Aspek Nilai Budaya Lokal." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2021): 34–42.
- Pangestu, Perdana Putra. "Gender, Women and Sexual Harassment: Critical Discourse Analysis in Social Prophetic Perspective." *Journal of Gender and Children Primacy Studies* 1, no. 1 (2023): 30–38.
- Pijper, Guillaume Frédéric. *Fragmento Islamica, Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam Di Indonesia Awal Abad XX, Terj. Tadjimah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1987.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija, C. S. Hardjasoedarma, and J. Chr Poedjasoedira. *Baoesastra Djawa*. Groningen-Batavia: J.B. Wolters, Uitgevers Maatschappij NV., 1939.
- Putra, Bagas Dwipantara, and Hani Yulindrasari. "Peran Organisasi Perempuan Dalam Ruang Perkotaan." *Jurnal Penataan Ruang* 18, no. 1 (2023): 7–13.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2010. <https://osf.io/mfzuj/download>.
- Ramadhana, Dwindi, and Atyanto Dharoko. "Ruang Sakral Dan Profan Dalam Arsitektur Masjid Agung Demak, Jawa Tengah." *INERSIA Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur* 14, no. 1 (2018): 13–25.

- Reda, Nevin. "Women in the Mosque: Historical Perspectives on Segregation." *American Journal of Islam and Society* 21, no. 2 (2004): 77–97.
- Rosyid, Moh, and Lina Kushidayati. "A Gender Inequality in Mosque." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2023): 77–92.
- Salebaran, Salebaran, and Mutiah Amini. "Women, Military, and State: Indonesian Women's Military Representation During the Early Independence Period." *International Journal of Military History and Historiography* 1, no. aop (November 11, 2022): 1–27. <https://doi.org/10.1163/24683302-bja10032>.
- Scanzoni, Letha, and John Scanzoni. "Men, Women and Change: A Sociology of Marriage and Family,," 1976. <https://psycnet.apa.org/record/1976-20586-000>.
- Setyowati, Endang, Gagoek Hardiman, and Titin Woro Murtini. "Pathok Negro Mosque as the Form of Territorial Defense Region of Mataram Kingdom of Islam Java in Jogjakarta." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 106:012074. IOP Publishing, 2018. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/106/1/012074/meta>.
- Setyowati, Endang, Gaguk Hardiman, Titien Woro Murtini, and Vincentia Reni Vita Surya. *Mengenal Lebih Jauh Masjid Islam Jawa: Dalam Arsitektur Masjid Pathok Negro*. GalangPress, 2017. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=njVBDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=pathok+negara&ots=PF8Jy92B\\_f&sig=XMHOI13dLB1BkMn2PS7q9jjEfMI](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=njVBDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=pathok+negara&ots=PF8Jy92B_f&sig=XMHOI13dLB1BkMn2PS7q9jjEfMI).
- Siswayanti, Novita. "Akulturasi Budaya Pada Arsitektur Masjid Sunan Giri." *Jurnal Lektur Keagamaan* 14, no. 2 (2016): 299–326.
- Siti Jumaiyah, Warga Muslimah. Wawancara interaktif, February 2, 2024.
- Stivens, Maila. "Why Gender Matters in Southeast Asian Politics." *Asian Studies Association of Australia. Review* 13, no. 1 (July 1989): 4–12. <https://doi.org/10.1080/03147538908712584>.
- Subadi, Tjipto. "Metode Penelitian Kualitatif." Muhammadiyah University Press, 2006.

- <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5.%20Metode%20%20Penel.%20Kualitatif.pdf?sequence=1>.
- Sugiyarto, Agustinus Supriyono, and Endah Sri Hartatik. "Nobility and Land System in the Pre-Colonial Era of the Surakarta and Yogyakarta Kingdoms." *Paramita: Historical Studies Journal* 30, no. 2 (2020): 208–17.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulistiyowati, Nur Aini, and Heri Priyatmoko. *Toponim Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.
- Sumardjo, Jakob. *Arkeologi Budaya Indonesia, Pelacakan Hermeneutis-Historis Terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: PENERBIT QALAM, 2002.
- Sumiati, Warga Muslimah. Wawancara interaktif, January 26, 2024.
- Syamsurijal, Syamsurijal. "Menuju Feminisme Nusantara: Menata Ulang Gerakan Perempuan Di Indonesia." *MIMIKRI* 8, no. 1 (2022): 10–45.
- Tim Museum Sonobudoyo. *Masjid-Masjid Pathok Negero Di Kesultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: Museum Sonobudoyo Kraton Yogyakarta, 2009.
- Vioni, Eliska, and Irene Liansah. "Gender Equality in Patriarchic Culture." In *International Conference on Law Studies (INCOLS 2022)*, 168–77. Atlantis Press, 2022. <https://www.atlantispress.com/proceedings/incols-22/125977637>.
- Walidah, Warga Muslimah. Wawancara interaktif, January 27, 2024.
- Widiawati, Nani. *Metodologi Penelitian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Widyastuti, Sri Harti. "Kepribadian Wanita Jawa Dalam Serat Suluk Residriya Dan Serat Wulang Putri Karya Paku Buwono IX." *Litera* 13, no. 1 (2014).
- Wirjosuparto, Sutjipto. "Sedjarah Bangunan Mesdjid Di Indonesia." *Almanak Muhammadiyah* 1381, no. 1382 (1962): 64–76.
- Wiryoprawiro, Zein. M. *Perkembangan Arsitektur*. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

- Wulan, Roro Retno. “Kajian Gender Dalam Ilmu Komunikasi.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna* 15, no. 1 (2019): 29–44.
- Wylie, Alison, and Sergio Sismondo. “Standpoint Theory, in Science.” In *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second Edition)*, edited by James D. Wright, 324–30. Elsevier, 2015. <https://philarchive.org/rec/SISSTI>.
- Yaser Arafat, Budayawan Jawa Matraman. Wawancara interaktif, January 31, 2024.
- Yuli, Nensi Golda. “The Spatial Concept at Moslem Settlements in Current Context of Modern Indonesia Using Phenomenology Method. Case Study: Pathok Negoro Area in Yogyakarta, Indonesia.” PhD Thesis, Dissertation, Weimar, Bauhaus-Universität Weimar, 2016, 2017. [https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/files/3125/Dissertation%20of%20Nensi%20Golda%20YULI\\_pdfa.pdf](https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/files/3125/Dissertation%20of%20Nensi%20Golda%20YULI_pdfa.pdf).
- Yuliarni, Yuliarni, Apriana Apriana, Heryati Heryati, and Suwonti Atun Badriah. “Peranan Prajurit Perempuan (Korps Prajurit Estri) Terhadap Perkembangan Ekonomi Dan Militer Di Yogyakarta 1750-1810.” *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah* 3, no. 1 (2020). <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/1826>.
- Yuniati, Lilis. “Pengaruh Kepemimpinan Keraton Pada Arsitektur Masjid Agung Surakarta.” In *Prosiding Seminar Heritage IPLBI*, 449–54, 2017. <https://scholar.archive.org/work/pst237ee3zc4rfiip3e2qdkjyi/abstract/wayback/https://seminar.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2017/06/HERITAGE2017-A-449-454-Pengaruh-Kepemimpinan-Keraton-pada-Arsitektur-Masjid-Agung-Surakarta.pdf>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Perdana Putra Pangestu
2. Tempat & Tgl. Lahir : Mojokerto, 8 Maret 2000
3. Alamat Rumah : Dsn. Janti, Ds. Wunut, RT 4, RW 2, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, 61364
- HP : 08886578576
- Email : perdanaputrapangestu@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
  - a. MI Roudlotul Hikmah 2006 – 2012
  - b. MTsN Mojosari 2006 – 2015
  - c. MAN Mojosari 2015 – 2018
  - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S1 – Ilmu Hadis) 2018 – 2022
  - e. UIN Walisongo Semarang (S2 – Komunikasi Penyiaran Islam) 2022 – 2024
2. Pendidikan Non-Formal: –

### C. Prestasi Akademik

–

### D. Karya Ilmiah

- a. Pangestu, Perdana Putra. "Mobilization of Da'wah Resources for Chinese Muslims in Indonesia." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 17.2 (2023): 221-230.
- b. Pangestu, Perdana Putra. "Gender Agitation and Anti-Sexual Harassment: A Study of Kuntowijoyo's Prophetic Social Perspectives." *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 6.2 (2022): 226-238.
- c. Pangestu, Perdana Putra. "Harmonisasi Sosial Perkotaan: Telaah Probabilitas Konflik Pada Tradisi Bangun Sahur Atas Regulasi Pengeras Suara Masjid." *Jurnal Penelitian* 15.1 (2021): 149-168.

- d. Pangestu, Perdana Putra. "Efektivitas Dakwah Hadis dalam Media Sosial: Analisis atas Teori Framing Robert N. Entman." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6.1 (2021): 67-82.
- e. Pangestu, Perdana Putra. "The Relationship of Hadith Style to the Social Society of the Nusantara: A Study on Qami'Al-Tughyan by Nawawi Al-Bantani." *International Journal Ihya'Ulum Al-Din* 23.1 (2021): 60-78.
- f. Pangestu, Perdana Putra. "Indonesian Muslim Identity Constellation in the Digital Media: Labeling Arrogant Islam by Permadi Arya on Social Media.
- g. Pangestu, Perdana Putra, and Muhammad Bachrul Ulum. "Konten Pemuda Tersesat dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Dakwah Masa Kini." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 17.1 (2021): 39-51.
- h. Pangestu, Perdana Putra. "Analysis of the Impact of Hoax on the Transformation of Social Piety in the Pandemic Time." *Ushuluddin International Conference (USICON)*. Vol. 4. 2020.

Google Scholar:



[rb.gy/hmowza](https://rb.gy/hmowza)

Semarang, 7 Mei 2024



**Perdana Putra Pangestu**  
NIM: 2201028008